

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

ATASI PANDEMI, PULIHKAN EKONOMI

Kesehatan masyarakat menjadi elemen utama dalam indeks pembangunan manusia. Sumber Daya Manusia yang sehat dan produktif menjadi modal perkembangan ekonomi yang baik. Pemerintah terus berupaya menangani pandemi COVID-19 sekaligus untuk memulihkan perekonomian nasional.



Daftar Isi



COVER STORY:

Pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kesehatan dan sosial bagi sektor dan masyarakat terdampak COVID-19. Sarung tangan diibaratkan sebagai pemerintah yang hadir dan siap membantu. Masker diibaratkan sebagai berbagai bantuan dan stimulus untuk sektor, kesehatan, dunia usaha, maupun bantuan sosial bagi masyarakat.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Foto Cover:

Resha Aditya Pratama

- 5 DARI LAPANGAN BANTENG
- 6 EKSPOSUR

LAPORAN UTAMA

- 8 Kesehatan Prioritas Utama
- 12 Menyelamatkan Manusia dari Pandemi
- 16 Infografik
- 18 Bersama Mengusir Wabah dari Bumi Indonesia
- 20 Tangkas Menanggulangi Kedaruratan

PHOTO STORY

- 22 Kala Riuhan Pasar Malam Tak Lagi Ada

TEKA TEKI

- 24 Teka Teki Medkeu

WAWANCARA

- 25 Bersenang-senang dengan Hidroponik

POTRET KANTOR

- 28 Khasiat Memangkas Sekat

BAGAIMANA CARANYA?

- 31 Syarat-syarat Beasiswa Reguler LPDP

FIGUR

- 32 Liku Langkah untuk Terus Maju

BUKU

- 35 Perjamuan Khong Guan: Suguhan Puisi ala Joko Pinurbo

OPINI

- 36 Penguatan UMKM di Tengah Risiko Resesi Ekonomi

UANG KITA BUAT APA

- 38 Rupa Loka Batik dari Dana Fisik

OPINI

- 40 Insentif Fiskal Pembasmi Pandemi

GENERASI EMAS

- 42 Pahami Manusia Lewat Musik

LOKAL

- 44 Menepi Sejenak ke Dieng Culture Festival

FINANSIAL

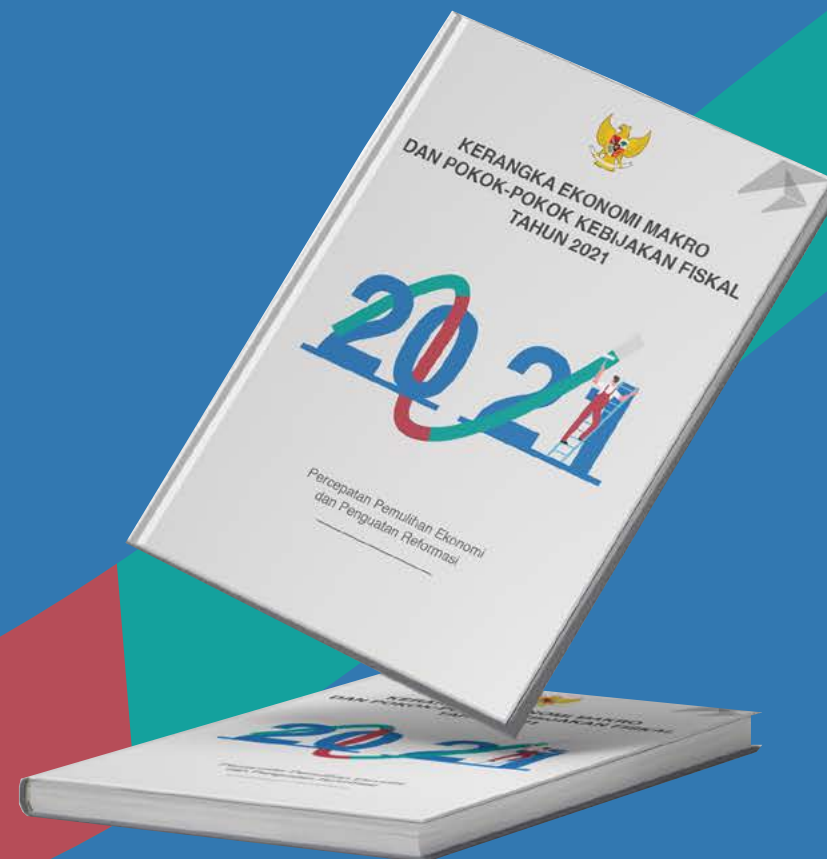
- 46 Makin Banyak Asuransi, Makin Baik?

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Suro, Budi Prayitno, Budi Sulisty. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiutannya.

Mau tahu ke mana arah kebijakan APBN tahun depan ?

Tahun 2020 ekonomi Indonesia mengalami perlambatan akibat dampak COVID-19, bagaimana upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi tahun 2021 dan strateginya dalam jangka menengah? Silakan baca **Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021**



KEM-PPKF adalah dokumen yang akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021. KEM PPKF 2021 mengangkat tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi"

Unduh di:

www.fiskal.kemenkeu.go.id/kemppkf



Dari Lapangan Banteng

Perjuangan Meredam Pandemi

DEJAVU! Seabad yang silam, tepatnya tahun 1918 sampai dengan 1921, dunia pernah diserang wabah influenza bernama flu Spanyol dikarenakan serangan terbesarnya terjadi di Madrid. Pada saat itu, tak ada negara yang luput dari serangannya termasuk Indonesia. Penularannya yang sangat cepat dan luas berakibat pada jumlah korban amat tinggi. Korban berjatuhan begitu masif sementara jumlah tenaga medis dan jumlah sarana kesehatan tak sebanding. Banyaknya pasien gawat membuat sekolah dan bangunan lainnya disulap menjadi rumah sakit darurat. Belum lagi sistem perawatan kesehatan yang berbeda antara si miskin dan si kaya. Pekerja harian pun mulai kehilangan penghasilan. Pengangguran meledak. Sukarelawan merebak. Ekonomi terpuruk.

Tunggu dulu, ini gambaran tahun 1920 atau Maret 2020? Kenapa begitu sama? Begitulah siklus pandemi. Krisis kesehatan berubah menjadi

krisis kemanusiaan karena korban berjatuhan. Manusia harus mengurangi interaksi untuk mencegah penyebaran. Akibatnya roda ekonomi berhenti. Pandemi flu COVID-19 yang sedang mengguncang dunia ini juga telah mengacaukan keadaan global termasuk situasi ekonominya. Laporan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami minus hingga 3persen di 2020 akibat COVID-19 sementara lembaga lain menggunakan asumsi yang berbeda. Beragam proyeksi ini muncul karena tak ada yang dapat memperkirakan dengan pasti kapan krisis ini akan berakhir.

Langkah mencegah terjadinya krisis ekonomi pun dilakukan secara cepat dan masif. Presiden Joko Widodo telah menegaskan agar pemerintah melakukan realokasi anggaran ke 3 fokus utama: bidang kesehatan, perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial, dan insentif ekonomi bagi dunia usaha. Berbagai payung hukum terbit seperti Perppu dan aturan turunannya untuk menjalankan program ini. Pemerintah

bersama KSSK mengumumkan kondisi stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun potensi risiko dari makin meluasnya dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diantisipasi. Berbagai bantuan sosial dan stimulus fiskal disiapkan menghadapi tekanan dan khususnya membantu masyarakat miskin dan rentang miskin, serta menyelamatkan UMKM.

Dejavu pandemi seperti sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Namun kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan ekonomi dan keuangan adalah keniscayaan. Sampai di manakah perjuangan? Dapatkan jawaban mengenai upaya dan ikhtiar pemerintah yang tak kenal lelah di edisi ini.

Selamat membaca!

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Majalah Media Keuangan
@majalahmediakeuangan

Menurut Anda, sektor mana yang harusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam usaha menangani pandemi ini?

- Bidang Kesehatan
- Jaminan Keamanan Sosial
- Dunia Usaha

@sasmitanarax:

Bidang kesehatan, karena saat ini tantangan utamanya adalah bagaimana wabah ini bisa ditekan penyebarannya hingga seluruh aktivitas bisa berjalan kembali

@zemyherda:

Menurut saya untuk saat ini pemerintah baiknya fokus pada sektor dunia usaha karena stimulus yang diberikan belum cukup untuk mengembalikan iklim usaha sehat.

@atri.widi:

Dunia usaha karena jika ekonomi Indonesia kuat, Indonesia akan maju dan bisa pulih dari pandemi ini



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



majalahmediakeuangan

Latihan Rutin Bangun Hubungan

K9 *dog handler* memiliki peran yang sangat penting. Mereka berkewajiban untuk selalu menjaga suasana hati yang ceria untuk performa K9 yang baik. Saat mereka terlihat seperti sedang bermain, di situ mereka sedang berlatih untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap masuknya barang berbahaya khususnya narkoba. Mereka telah berhasil membangun hubungan profesional seperti *jogging, brushing, dan feeding*. Tidak heran kalau situasi pandemi ini membuat mereka merindukan rutinitas bersama seperti sediakala.



KESEHATAN PRIORITAS UTAMA

Teks Dara Haspramudilla

Kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi bagaikan dua sisi mata uang. Kesehatan masyarakat berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itulah sebabnya, kesehatan masyarakat menjadi elemen utama dalam indeks pembangunan manusia. Sebuah negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang baik sudah barang tentu memiliki sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Pandemi COVID-19 menjadi momentum pengingat bahwa kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi seperti mata rantai yang saling berpaut pada sebuah gir yang menggerakkan roda kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini layaknya *bungee jumping* yang telah membawa ekonomi terjun bebas. Beberapa negara yang memiliki angka kasus COVID-19 yang tinggi, perekonomiannya pun ikut terperosok.

Dua Sisi Saling Mempengaruhi

Dalam situasi ini, pemerintah seolah dihadapkan pada situasi untuk memilih mana yang ingin diselamatkan, apakah kesehatan masyarakat atau kesehatan

ekonomi? Namun sejatinya, keduanya adalah prioritas. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan sejumlah anggaran yang dialokasikan. Keduanya menunjukkan semangat pemerintah meniadakan dikotomi antara kesehatan masyarakat ataupun kesehatan ekonomi.

“Sebagai pemerintah, terutama di Kemenkeu, kita memastikan anggaran untuk kesehatan masyarakat tersedia dan meminimalisir penyebaran melalui berbagai kebijakan. Hal ini disebabkan penyebaran dan lamanya ini sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi. Sekilas memang terlihat ada *trade off* antara ekonomi dan kesehatan. Namun, sebenarnya dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas terlihat bahwa

Pandemi COVID-19 menjadi momentum pengingat bahwa kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi seperti mata rantai yang saling berpaut pada sebuah gir yang menggerakkan roda kehidupan

Foto
Ginanjari Rah
Widodo

yang ingin diselamatkan adalah kita, masyarakat, manusianya,” tutur Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi.

Masyita menambahkan latar belakang dikeluarkannya Perppu Nomor 1/2020 adalah untuk memperkuat APBN.

“Krisis saat ini berbeda dengan krisis ekonomi yang pernah dialami di tahun 1930, 1997 atau 2008. Di tahun-tahun tersebut, krisis dimulai dari sektor keuangan tetapi krisis sekarang langsung menyentuh sektor riil akibat keterbatasan interaksi. Untuk itu, kita berusaha membuat APBN menjadi *shock absorber*,” terang Masyita.

Abra Talattov, Ekonom INDEF juga berpendapat bahwa dari sisi stimulus fiskal kebijakan pemerintah saat ini sudah sejalan dengan upaya yang dilakukan negara lain. Menurutnya, penerbitan Perppu Nomor 1/2020 adalah langkah yang baik tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

“Jika saya lihat di dalam Perppu itu sudah lengkap instrumennya. Dari sisi anggaran itu variasinya cukup lengkap dan semua elemen masyarakat sudah tersasar mulai dari rumah tangga, industri, UMKM bahkan usaha kecil mikro. Namun, sisi efektivitas dan kecepatan ini perlu diperhatikan. Anggaran ada tetapi faktor kecepatan penyalurannya juga akan berpengaruh untuk daya beli masyarakat. Selain itu, Perpu ini memiliki risiko sebab defisit fiskal boleh lebih dari 3 persen. Perlu dijaga agar tetap dalam batas yang aman sesuai kondisi kesehatan APBN,” ujar Abra.

Tangani asapnya, padamkan apinya

Terkait insentif perpajakan dan bea masuk, ahli kesehatan masyarakat, Prof. Hasbullah Thabrany berpendapat bahwa kebijakan tersebut baik tetapi belum menangani akar permasalahan.

“Ibarat kebakaran, ada asap dan

”

“...dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas terlihat bahwa yang ingin diselamatkan adalah kita, masyarakat, manusianya,”



Masyita Crystallin
Staf Khusus Menteri Keuangan

“Pendanaan seharusnya difokuskan pada kebijakan yang dapat mencegah meningkatnya penularan. Dengan demikian, kita bisa menghemat belanja waktu di hilir, biaya berobat, dan meringankan kapasitas kita yang kurang memadai. Ini selanjutnya menjadi bagian dari kebijakan Kemenkes,”



Prof. Hasbullah Thabrany
ahli kesehatan masyarakat

api. Apinya itu COVID-19, panasnya adalah pelayanan kesehatan dan efek sosial ekonominya itu asap. Kebijakan insentif pajak dan bea masuk impor itu logis dan bagus tetapi baru menangani asapnya. Pembelian ventilator dan pembukaan rumah sakit itu baru menangani panasnya. Lalu apa kebijakan pemadaman apinya? Ya, PSBB”, ujar guru besar FKM UI ini.

Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diambil dari alokasi Rp405 triliun itu sifatnya lebih ke *balancing*. “Pendanaan seharusnya difokuskan pada kebijakan yang dapat mencegah meningkatnya penularan. Dengan demikian, kita bisa menghemat belanja waktu di hilir, biaya berobat, dan meringankan kapasitas kita yang kurang memadai. Ini selanjutnya menjadi bagian dari kebijakan Kemenkes,” jelasnya.

Hal senada juga diungkap Abra. Menurutnya stimulus seperti pembebasan impor alat kesehatan baik pajak maupun bea masuk membantu tetapi dalam jangka pendek dan perlu diperhatikan target lamanya kebijakan tersebut.

“Dalam satu bulan stimulus yang diberikan lumayan besar sekitar Rp170 miliar. Dikhawatirkan jika terus berlanjut maka akan menjadi disinsentif bagi industri alat kesehatan dan farmasi di dalam negeri,” tambahnya.

Bukan sekedar nominal tetapi efektivitas alokasi

Berbicara mengenai besaran anggaran belanja kesehatan, Masyita menuturkan bahwa saat ini kesehatan menjadi prioritas pemerintah. Namun demikian, ini bukan semata soal alokasi anggaran tetapi juga soal peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

“Jadi di Kemenkeu itu *evidence based policy*. Kita memiliki data pengeluaran K/L harian lalu data tersebut dianalisa. Kita memperhatikan kemampuan *disbursement* dari K/L. Saat



Pandemi COVID-19 ini diharapkan dapat mendorong alokasi dana untuk riset dan pengembangan kesehatan serta investasi di sektor farmasi

Foto
Resha Aditya

ini, anggaran kesehatan penanganan COVID-19 sebesar 75 triliun. Jika dilihat datanya, hingga Maret belum terlihat lonjakan pengeluaran yang signifikan. Jadi, kita menunggu data April-Mei untuk melihat apakah perlu anggaran tambahan,” jelasnya.

Abra juga menjelaskan “Jika dilihat, porsi belanja kesehatan APBN 2020 sebesar 5,2 persen sudah memenuhi mandat UU Kesehatan. Namun, perlu dievaluasi efektivitasnya terutama dalam mendorong kualitas pelayanan kesehatan. Saat ini, tentu ada lonjakan kebutuhan mendadak untuk penanganan COVID-19. Ke depannya, bisa dimandatorikan sebesar 1-1,5 persen terhadap belanja sebagai biaya tak terduga untuk mitigasi risiko bencana alam dan non alam,” ungkapnya.

Harapan kebijakan di masa depan

Pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran dalam pengambilan kebijakan khususnya untuk sektor kesehatan di masa depan. Momentum ini diharapkan dapat mendorong alokasi

dana untuk riset dan pengembangan kesehatan serta investasi di sektor farmasi.

“Saya pikir kedepannya stimulus diarahkan untuk mendorong riset dan pengembangan serta investasi sektor farmasi. Pemerintah perlu mengarahkan dana riset di lintas K/L ini agar sinergis sehingga dapat menciptakan produk alkes dan farmasi buatan Indonesia. Ini juga jadi momentum bagi BUMN di sektor farmasi untuk menggenjot daya saing. Harapannya BUMN farmasi ini bisa mulai bersaing di pasar domestik dan jangka panjang punya potensi melakukan ekspor,” harap Abra.

Hal senada juga diungkap Prof. Hasbullah, ia mengakui bahwa investasi sebuah negara di bidang kesehatan berhubungan dengan keberhasilan menangani COVID-19. Ia juga menambahkan bahwa edukasi publik yang sistematis terkait kesehatan adalah kebijakan yang belum muncul namun sangat dibutuhkan.

“Kalau saya lihat kebijakan yang belum muncul dan yang secara

sistematis efektif adalah *mass education* dalam kasus ini. Saat ini yang terjadi *mass education*nya pada media tetapi tidak praktikal dari pemerintah ke masyarakat. Perlu komunikasi melalui kelompok-kelompok tertentu dengan tetap menjaga jarak dengan tujuan mendorong terjadinya perubahan perilaku,” ucapnya.

Sementara itu, Masyita berharap pandemi ini dapat dilalui dengan baik dan masyarakat yang terdampak bisa mendapat bantuan yang dibutuhkan. Ia juga berharap setelah pandemi berakhir perekonomian akan lebih baik.

“Memang tidak mudah menghadapi ini baik buat Indonesia maupun semua negara di dunia. Bahkan negara maju pun mengalami kesulitan. Sektor ekonomi berusaha kita selamatkan sebab kita tidak mau masyarakat kehilangan pekerjaan akibat sektor industri terlanjur mati. Namun, terkadang media selalu membenturkan kalau menjaga ekonomi itu tidak menjaga manusianya. Padahal jika sektor riil itu jatuh yang rugi masyarakat juga,” pungkasnya.

MENYELAMATKAN MANUSIA DARI PANDEMI

Teks Reni Saptati D.I

Kementerian Keuangan memberikan sejumlah insentif perpajakan, bahkan ketika pandemi baru merebak salah satunya fasilitas pembebasan etil alkohol untuk pembuatan *hand sanitizer*

Foto Ilustrasi KemenkeuRI

Masa pandemi COVID-19 belum jua terlewati. Dampaknya begitu besar, baik di sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Agar tak terimbas kian dalam, diterbitkan serangkaian kebijakan *extraordinary*. Anggaran negara diprioritaskan pada tiga hal: kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan perlindungan dunia usaha. Sebab, fokus utama pemerintah adalah menyelamatkan berbagai sisi dari manusia.

Kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendukung penanggulangan COVID-19. Demikian dituturkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Secara responsif, Kementerian Keuangan memberikan sejumlah insentif perpajakan, bahkan ketika pandemi baru merebak.

“Pertama, insentif kepada pelayanan kesehatan. Yang kedua, terkait jaring pengaman sosial, kita mendukung upaya peningkatan daya beli masyarakat. Ketiga, dukungan kepada kegiatan usaha supaya mereka bisa menjaga

keberlangsungan hidupnya dalam kondisi sulit ini,” terang pria yang meraih gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California tersebut.

Namun demikian, Hestu menekankan pentingnya menjaga kepatuhan wajib pajak selama periode pemberian insentif. “Jangan kemudian muncul euforia lupakan dulu pajak lantaran kegiatan usaha melemah. Kita harus tetap menjaga tingkat kepatuhan masyarakat dan pengusaha wajib pajak.”

Beragam insentif pajak

Sejak awal April beragam insentif dilahirkan, sebagian termuat dalam PMK 28/2020. “PMK 28 merupakan insentif perpajakan untuk sektor kesehatan,” ungkap Hestu. Dari segi subjek, ada tiga pihak yang diberi insentif, yaitu instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah atau rumah sakit tadi untuk mendukung penanganan COVID-19.

Dari segi objek, barang yang dimaksud ialah obat, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, APD, perawatan untuk pasien, dan pendukung lainnya. “Ada juga jasa untuk penanganan COVID-19, misalnya jasa sewa tempat bagi pasien isolasi,” tambah Hestu. Atas barang dan jasa tersebut, diberikan pembebasan PPh 22 impor dan PPN-nya, pembebasan PPh 22, pembebasan PPh 21, serta pembebasan PPh 23.

“Kita juga ada PMK yang bersama Ditjen Bea Cukai, yaitu PMK 34/2020. Pajak dalam rangka impor tidak dipungut dulu karena dibutuhkan kecepatan atas pengadaan barang-barang yang dalam kondisi normal juga diperlukan tapi tidak sebanyak sekarang,” ujar Hestu.

Dunia UMKM tak luput dari perhatian. Pemerintah menanggung PPh final 0,5 persen bagi pelaku

UMKM untuk masa pajak April hingga September 2020. “Kenapa tidak dinolkan? Karena kita menjaga kepatuhan. Skemanya ditanggung pemerintah, tetapi mereka ada kewajiban tetap mencatat,” tegas Hestu. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan antara lain melalui *email blast* kepada sekitar 2,1 juta pelaku UMKM.

Dalam konteks mendukung dunia usaha, Hestu menyatakan pemerintah telah menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2020. “Kita langsung bergerak supaya dampak penurunan tarif langsung efektif di tahun ini,” ungkapnya. Oleh sebab itu, sejak April hingga Desember, tarif PPh Badan yang diterapkan sudah di besaran 22 persen.

Tak hanya itu, PMK 44/2020 juga hadir memberi insentif bagi hampir seluruh sektor usaha. Aturan tersebut menyebutkan kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk 1.062 bidang industri, pembebasan PPh 22 impor untuk 431 bidang industri, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen untuk 846 bidang industri, dan restitusi PPN dipercepat untuk 431 bidang industri. Seluruhnya berlaku sejak April hingga September 2020. “Mengapa enam bulan? Insentif fiskal tidak berjalan sendiri. Kita sinkronkan dengan skema besar penanganan COVID-19 yang diterapkan sekitar enam bulan dulu.”

Dukung produksi *hand sanitizer*

Kelangkaan *hand sanitizer* dan disinfektan sudah terjadi sejak bulan Maret, bahkan sebelumnya. Padahal keduanya dibutuhkan dalam jumlah sangat banyak dan cepat. “Kementerian Keuangan dalam hal ini DJBC segera merespons dengan memperluas subjek yang mendapat fasilitas pembebasan etil alkohol,” ungkap Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan

Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto. Hingga 8 Mei 2020 saja, total etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai mencapai 68.596.360 liter untuk sektor komersial dan 322.770 liter untuk sektor nonkomersial. “Jika tidak dibebaskan, tarif per liternya Rp20.000,” sebut Nirwala.

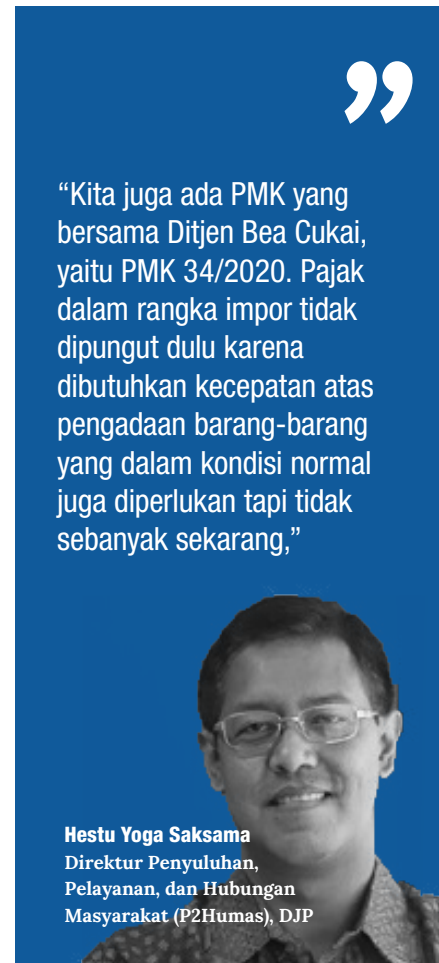
Hingga awal Mei, total pengguna fasilitas dari sektor nonkomersial sudah mencapai 56 entitas, salah satunya Universitas Brawijaya. Ketua Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya dr. Aurick Yudha Nagara, Sp.EM mengaku sangat terbantu dengan fasilitas tersebut. “Kami jelas merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Universitas Brawijaya membentuk Satgas COVID-19 dan meramu berbagai kegiatan, termasuk penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Kami menggunakan protokol yang ada di rumah sakit, yaitu penyediaan *hand sanitizer*. Rencananya beli sendiri, tetapi ternyata *cost*-nya mahal. Usut punya usut, Fakultas Pertanian ternyata memiliki mesin produksi. Lalu, komposisinya dari teman-teman Farmasi dan pengujiannya oleh teman-teman Mikrobiologi di Fakultas Kedokteran,” cerita dokter spesialis *emergency medicine* tersebut.

Awalnya, *hand sanitizer* tersebut ditujukan untuk penggunaan internal kampus, termasuk mahasiswa profesi di rumah sakit pendidikan yang jumlahnya mencapai 700 orang. Namun, kemudian *hand sanitizer* tersebut juga dipasok ke rumah sakit pendidikan, pondok pesantren, lapas di area Malang, serta beberapa instansi pemerintahan. “Produksi tetap akan kami lanjutkan karena ancaman COVID-19 masih terus ada,” ungkapnya.

Kebijakan DJBC lainnya ialah fasilitas penundaan pembayaran cukai. Pemesanan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada 9 April-9 Juli 2020 diberikan penundaan pembayaran

selama 90 hari. “Per 30 April 2020, sudah 78 pabrik memanfaatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai dengan nilai cukai lebih dari Rp10,5 triliun,” kata Nirwala. Selain itu, DJBC juga menerbitkan relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar.



Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat (P2Humas), DJP

Dorong Pemda lakukan *refocusing*

“Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga memiliki concern pada tiga hal tadi. Mulai dari kesehatan, bantuan sosial, hingga penguatan ekonomi, termasuk di dalamnya UMKM,” Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menegaskan. Secara garis besar, terdapat empat pokok kebijakan TKDD

dalam penanganan Covid-19, yakni penyesuaian alokasi TKDD, refocusing TKDD, relaksasi penyaluran TKDD, dan refocusing belanja APBD agar fokus pada penanganan Covid-19.

Perpres 54/2020 mengamanatkan penyesuaian atau penghematan alokasi TKDD. “Total penghematan TKDD sekitar Rp94,2 triliun. Dari angka itu, kita harapkan daerah bisa melakukan realokasi dan refocusing untuk intervensi penanganan Covid-19, terutama bagi tiga hal utama tadi,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara tersebut.

Pihaknya meminta daerah untuk melakukan perhitungan kembali anggarannya. Untuk mempercepat penyesuaian APBD, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB). Hingga awal Mei, Astera menyatakan daerah yang patuh dengan SKB tersebut masih sedikit.

“Saat awal SKB, ada sekitar 380 daerah yang terpaksa kita sanksi. DAU-nya hanya kita bayarkan 65 persen. Tapi begitu daerah melakukan perbaikan, DAU langsung kita salurkan di kesempatan pertama tidak menunggu bulan berikutnya,” jelas Astera. Ia menyebut langkah itu manjur meningkatkan kepatuhan daerah.

“Ini suatu hal yang saya rasa baik. Sebenarnya kapasitas daerah untuk menangani Covid-19 masih ada, dalam arti mereka masih memiliki space, sepanjang mereka disiplin dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran,” tutur Astera. Hingga minggu kedua bulan Mei, space dimaksud sudah di kisaran Rp57 triliun dan angkanya masih akan terus bergerak. “Ini meningkatkan kepercayaan diri. Kita yakin daerah masih punya kemampuan untuk menangani Covid-19,” tutupnya.

PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 KEBIJAKAN PAJAK

MENGHADAPI DAMPAK COVID-19

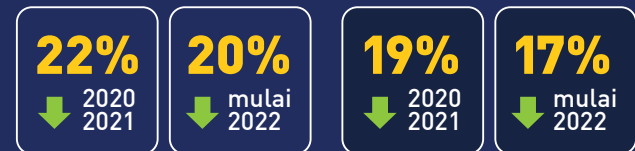
Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, salah satunya dengan memberikan **kebijakan pajak**.

Tarif PPh Badan Go Public* 3% lebih rendah dari tarif umum:

* Dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh PP

Tarif umum turun dari 25% menjadi:



Penurunan Tarif PPh Badan Secara Bertahap

Perlakuan Pajak Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- Pengenaan PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa
- Pengenaan PPh/pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh **Subjek Pajak Luar Negeri** yang memenuhi ketentuan kehadiran signifikan
- Tata cara lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan

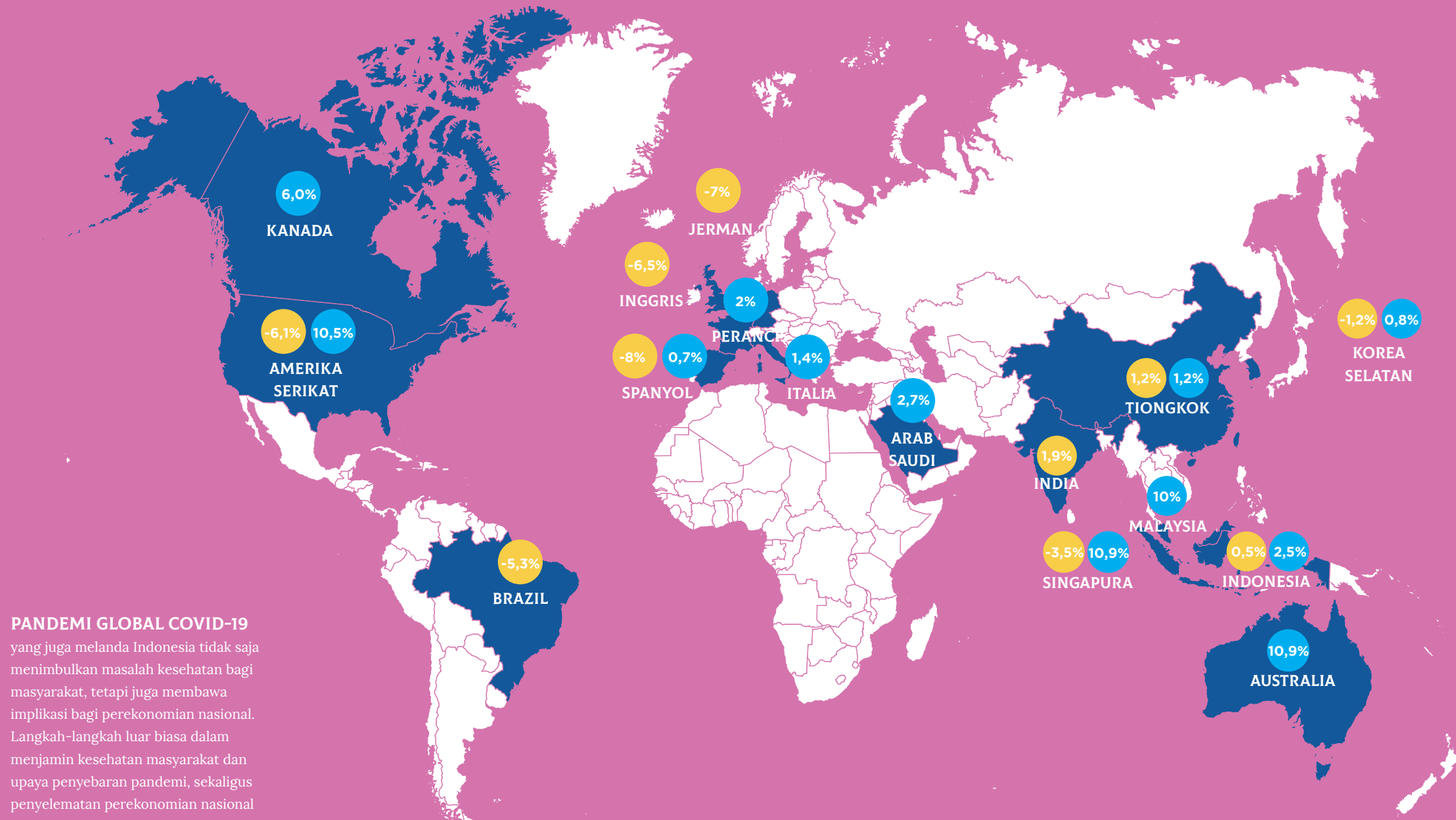
Perpanjangan Jangka Waktu Pengajuan oleh Wajib Pajak dan Penyelesaian oleh DJP

- Bagi Wajib Pajak**
Permohonan keberatan diperpanjang menjadi **9 bulan**
- Bagi DJP**
Perpanjangan jangka waktu penyelesaian:
- Permohonan restitusi melalui pemeriksaan menjadi **18 bulan**
 - Permohonan keberatan menjadi **18 bulan**
 - Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi **12 bulan**
 - Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak atau pembatalan hasil pemeriksaan menjadi **12 bulan**

Khusus untuk penyelesaian **pencairan lebih bayar** pajak diperpanjang 1 bulan dari 1 menjadi **2 bulan**

KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI

PILAR EKONOMI NASIONAL



PANDEMI GLOBAL COVID-19 yang juga melanda Indonesia tidak saja menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga membawa implikasi bagi perekonomian nasional. Langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat dan upaya penyebaran pandemi, sekaligus penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan telah dilakukan Pemerintah. Seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan apa yang telah dilakukan pemerintah?

KETERANGAN

● Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Akibat COVID-19 (Beberapa Negara)

● Dukungan Fiskal Negara-Negara di Dunia untuk Penanganan Covid-19 (Beberapa Negara)

KEBIJAKAN STIMULUS RI DALAM MENANGANI DAMPAK PANDEMI COVID-19

- Stimulus 1: Belanja untuk memperkuat perekonomian domestik melalui program:**
- ▲ Percepatan pencairan belanja modal
 - ▲ Percepatan pencairan belanja Bantuan Sosial
 - ▲ Transfer ke daerah dan dana desa
 - ▲ Perluasan kartu sembako
 - ▲ Insentif sektor pariwisata

- Stimulus 2: Menjaga Daya Beli Masyarakat dan Kemudahan ekspor impor**
- ▲ PPh pasal 21 pekerja sektor industri pengolahan yang penghasilan maks Rp200 juta ditanggung pemerintah 100%
 - ▲ PPh pasal 22 impor 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM
 - ▲ Pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu
 - ▲ Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM
 - ▲ Non fiskal: berbagai fasilitas keluar masuk barang supaya lebih mudah

- Stimulus lanjutan:**
- ▲ Sektor Kesehatan: intervensi untuk penanganan COVID-19 dan subsidi iuran BPJS
 - ▲ Tambahan Jaring Pengaman Sosial: penambahan penyaluran PKH, Bansos, Kartu Pra Kerja, subsidi tarif listrik, program jaring pengaman sosial lainnya
 - ▲ Dukungan industri berupa perluasan insentif pajak untuk PPh 21, PPh 22 Impor, PPN, bea masuk DTP, stimulus KUR
 - ▲ Dukungan untuk dunia usaha berupa pembiayaan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk Ultra Mikro

4 POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RANGKA PENCEGAHAN/PENANGANAN PENCEGAHAN/PENANGANAN COVID-19:

- ▲ Penyesuaian Alokasi TKDD
- ▲ Refocusing TKDD agar digunakan untuk penanganan COVID-19
- ▲ Relaksasi penyaluran TKDD
- ▲ Refocusing belanja APBD agar fokus pada penanganan COVID-19



Penunjukkan RS rujukan dan jejaring rujukan di bawahnya adalah untuk membagi beban pelayanan pasien COVID-19 supaya lebih merata

Foto
Resha Aditya P

BERSAMA MENGUSIR WABAH DARI BUMI INDONESIA

Teks Dimach Putra

Ika Istakariana merupakan Auditor Madya yang bertugas di Inspektorat V pada Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan. Perempuan yang akrab dipanggil Ika ini baru saja pulang menunaikan ibadah umroh dengan keluarga besar pada 1 Maret 2020. Namun, Ika baru mulai berkantor dua pekan setelahnya karena mengkarantina diri sendiri sesuai Surat Edaran tentang protokol pencegahan COVID-19 dari kantornya. Selang 10 hari kemudian (26/03) sepulang kantor, Ika merasakan demam di tubuhnya.

Siklus demam Ika yang naik turun terus berulang. Setelah beberapa hari, pegawai fungsional ini berinisiatif menghubungi COVID-19 Center, di mana ia dianjurkan untuk memeriksakan diri ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terdekat. Hasil tes di Puskesmas menyatakan dirinya terkena *typhus* ringan.

Percaya pada insting dan inisiatif

Keesokan harinya, Ika merasakan lemas karena diare yang juga dialaminya. Khawatir makin parah, putri Ika membawanya ke UGD salah satu rumah

sakit besar di pusat Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, Ika dianjurkan menjalani *rapid test* dan hasilnya dinyatakan reaktif. Selain itu, ditemukan bercak putih di bagian paru-parunya. Pihak rumah sakit lalu memberinya rujukan untuk melakukan *swab test* di Wisma Atlet. Namun, perjuangan Ika ke Wisma Atlet tidak berbuah manis ketika ia mendapat kabar bahwa tempat tersebut tidak bisa melakukan *swab test*. Bagi pasien seperti Ika yang hasil tesnya menunjukkan indikasi kuat positif COVID-19, pihak Wisma Atlet hanya bisa memberikan layanan karantina.

Sempat mengalami kesulitan melakukan *swab test* di beberapa rumah sakit, akhirnya Ika berhasil dijadwalkan melakukan tes dengan biaya mandiri di salah satu RS rujukan COVID-19 berkat bantuan petugas COVID-19 Center kantornya. Tes yang hanya memakan waktu 10 menit itu kembali menyisakan pertanyaan untuk Ika. Setelah menjalani tes, ia hanya diminta pulang tanpa diberi penjelasan. Ia bahkan harus meminta kembali bantuan dari COVID-19 Center kantor untuk bisa mendapat konsultasi dari dokter. "Saya cuma ingin terinfo dengan baik apa yang harus saya lakukan? Apakah harus dirawat inap atau bisa karantina mandiri di rumah saja?" ucapnya.

Optimis mengalahkan pesimis

Apa yang dialami Ika mungkin bisa membuat siapa saja yang mendengar kisahnya mengelus dada. Namun, Ika paham bahwa pandemi ini bukanlah kondisi ideal. Bisa dibayangkan, dirinya termasuk pasien awal saat wabah COVID-19 ini melanda di dalam negeri. Oleh karena itu, tenaga kesehatan jumlahnya dan fasilitas kesehatan masih terbatas. "Saya bersyukur saya diberi kemampuan untuk melakukan tes mandiri, banyak yang tidak seberuntung saya. Tapi saya yakin pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaiki penanganan COVID-19 ini," ucapnya optimis.

Setelah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, Ika kemudian disiplin menjalani karantina ketat secara mandiri di rumahnya. Masa karantainya yang lebih dari sebulan pun diisi dengan kegiatan positif dan produktif dengan tetap menjalankan tugas sebagai auditor dari rumah.

Auditor senior ini juga terbuka dengan statusnya, terutama dengan mereka yang sempat berkontak langsung. Suatu hal yang patut disyukurinya bahwa keluarga dan kolega

yang telah diperiksa dinyatakan negatif. Saat ini, Ika telah pulih. Tes keduanya sudah dinyatakan negatif, tinggal menunggu yang ketiga.

Jejaring penanganan pasien

Optimisme Ika akan usaha pemerintah yang semakin serius menangani COVID-19 nampaknya bukan tanpa alasan. Pemerintah telah memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan yang dapat menangani pasien COVID-19. Salah satunya adalah RS PGI Cikini. Secara resmi RS ini memang bukan rujukan utama bagi pasien COVID-19, melainkan rumah sakit jejaring rujukan. "Sejak 3 Maret hingga saat ini (11/05) RS PGI Cikini telah merawat 162 orang terduga COVID-19, 36 diantaranya terkonfirmasi positif," beber dr. Alphinus Kambodji, Plt. Direktur Ketua RS PGI Cikini.

Penunjukkan RS rujukan dan jejaring rujukan di bawahnya ini tidak lain untuk membagi beban pelayanan pasien COVID-19 supaya lebih merata. Untuk itu, pemerintah terus berusaha memenuhi kebutuhan rumah sakit untuk meningkatkan fasilitas pelayanan. Sebagai gambaran, RS PGI Cikini membutuhkan setidaknya 120 set Alat Perlindungan Diri (APD) lengkap per hari. RS ini juga telah menyulap satu gedung yang terdiri dari 31 kamar khusus perawatan pasien COVID-19. Selain itu, masih ada beberapa alat kesehatan yang sangat dibutuhkan RS ini, baik dari segi kualitas maupun kapasitas tangungnya.

Melalui Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) serta Persatuan Rumah Sakit Swasta Indonesia, kebutuhan tiap RS didata. Cara tersebut memudahkan proses administrasi yang akan dilaporkan ke pemerintah. Dari hasil pendataan tersebut, kebutuhan tersebut didistribusikan ke tiap rumah sakit meski tidak bisa serta merta terpenuhi. "Kami paham karena kebutuhan yang harus dipenuhi itu se-Indonesia dan di awal-awal memang terbatas stoknya," ungkap dr. Alphin.

Bersama-sama mengusir wabah

Pemerintah telah memberi jaminan biaya perawatan para pasien positif COVID-19 dengan menanggung biaya tersebut melalui Kementerian Kesehatan. Namun agar sesuai tata kelola, pelaporan biaya perawatan harus disampaikan ke BPJS untuk diverifikasi. "Supaya tidak ada *fraud*. Jadi fungsi kontrol tetap dijalankan dengan baik, meski di tengah kondisi yang genting ini," puji Alphin.

Sebagai garda terdepan perawatan pasien COVID-19, pengorbanan para tenaga kesehatan memang tak akan pernah bisa dinilai dari materi. Namun, perjuangan mereka tak luput dari apresiasi pemerintah. Melalui Kemenkes, pemerintah berkomitmen memberikan insentif bagi para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Alphin mengaku telah mendapat surat pemberitahuan tentang kebijakan insentif tersebut dari Kemenkes. Meski begitu, mekanisme penyalurannya belum dijelaskan secara rinci. "Tapi itu nanti, kami belum memikirkannya. Yang penting kesehatan para pasien yang kami tangani," ujarnya.

Meski dua bulan telah berlalu, angka pasien yang terjangkit virus global ini masih tergolong tinggi. Agar bisa segera berakhir, perlu kedisiplinan semua warga untuk menjalankan perannya. Alphinus sebagai tenaga medis optimis bahwa kita akan melalui semua ini bersama. Ia merasakan betul bagaimana semua pihak peduli dalam pemenuhan kebutuhan RS PGI Cikini. Tak hanya pemerintah, berbagai organisasi dan masyarakat umum juga turut berperan melalui gerakan sosial.

Tenaga medis akan terus mengabdikan waktu dan keilmuannya merawat para pasien meski nyawa taruhannya. Kita sebagai warga masyarakat sudah sepatutnya melakukan hal paling sederhana. Patuhi semua protokol yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, kita semua turut berperan aktif mengusir pergi virus COVID-19 ini dari bumi Indonesia.

TANGKAS MENANGGULANGI KEDARURATAN

Teks CS. Purwowidhu

C OVID-19 yang belum kunjung usai tidak hanya mengorbankan kesehatan masyarakat tapi juga kian berdampak pada ekonomi. Di tengah kecamuk pandemi, pemerintah terus mengadaptasi kebijakan dengan kebutuhan kondisi terkini. Kecepatan pemenuhan anggaran penanganan COVID-19 ini menjadi sebuah keharusan agar pandemi segera terbasmi dari negeri. Simak wawancara Media Keuangan dengan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kunta

Wibawa Dasa Nugraha, mengenai optimalisasi anggaran kesehatan untuk atasi kedaruratan.

Bagaimana APBN kita memprioritaskan kesehatan masyarakat selama ini?

Anggaran Kesehatan dan anggaran Pendidikan menjadi concern Pemerintah selama ini, untuk meningkatkan kualitas SDM. Sejak 2016, Pemerintah menjaga alokasi anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN, karena kesehatan berdampak langsung ke *future income* orang. Kalau orang sehat, dia akan semakin produktif. Secara tidak langsung, ini juga merupakan investasi Pemerintah di bidang SDM.

Dengan adanya pandemi COVID-19 bagaimana prioritas sektor kesehatan dikaitkan dengan ekonomi?

Pandemi ini menimbulkan krisis kesehatan lalu berdampak ke krisis ekonomi dan akhirnya bisa berdampak ke krisis keuangan. Karena pandemik ini belum ada obatnya, maka dilakukan pembatasan-pembatasan, seperti physical distancing, work from home, dan PSBB. Maka yang paling

terdampak pertama kali dari pandemi ini adalah sektor riil atau informal. Sehingga menimbulkan krisis ekonomi, kalau hal ini tidak segera diatasi akan berakibat pada krisis keuangan. Dengan kata lain, kesehatan, ekonomi dan keuangan ini saling mempengaruhi, tidak dapat dipisahkan.

Untuk merespons kondisi tersebut, saat ini Pemerintah memberi stimulus fiscal tahap 3 yang berfokus pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan pada dunia usaha. Dengan demikian, bukan hanya kesehatan masyarakat yang tertangani, tetapi masyarakat miskin, rentan miskin, serta dunia usaha yang sosial ekonominya terdampak COVID-19 juga bisa tetap hidup. Sehingga selama masa pandemi, kebutuhan pokok setidaknya dapat terpenuhi, daya beli terjaga dan saat pandemi berakhir, kita bisa segera bangkit kembali.

Apa strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan yang begitu dinamis di masa darurat ini?

Saat ini semuanya berubah serba cepat dan kita harus siap untuk mengantisipasinya. Jangan sampai telat karena risiko kedepannya sangat tinggi. Adanya Perppu Nomor

1 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas pada pemerintah untuk melakukan berbagai macam kebijakan atau pengelolaan alokasi anggaran supaya bisa cepat bergerak, seperti realokasi dan *refocusing* belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk tambahan anggaran yang difokuskan ke tiga hal kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha. Hal tersebut, juga didukung dengan kemungkinan untuk melakukan relaksasi defisit juga.

Kita juga melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara intensif sehingga kebutuhan di tiga fokus tadi bisa terpenuhi. Koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS juga terus dilakukan untuk menjaga kestabilan sektor keuangan.

Kebijakan anggaran apa saja yang diambil untuk mendukung sektor kesehatan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19?

Yang pertama, adalah pembentukan gugus tugas Covid-19 yang didukung pendanaan sekitar Rp3,1 triliun dari pemanfaatan cadangan APBN, yang dimanfaatkan untuk penanganan Kesehatan di masa awal darurat pandemic Covid-19.

Selanjutnya, kita memberikan stimulus fiskal berupa tambahan belanja kesehatan Rp75 triliun (dari total stimulus tahap 3 sebesar Rp405 triliun) yang difokuskan pada belanja penanganan Kesehatan (antara lain peralatan, sarpras Kesehatan, dan biaya penggantian klaim perawatan pasien positif Covid-19), insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis, dan bantuan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3.

Lalu kita juga lakukan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran K/L dan pemda. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan terus memantau perkembangan revisi anggaran K/L untuk penanganan COVID-19 serta pelaksanaan anggarannya.

Selain itu, kita juga memberikan insentif fiskal berupa fasilitas perpajakan, khususnya untuk pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan. Dengan dukungan tersebut, sekarang sudah banyak industri dalam negeri yang bisa memproduksi Alat Pelindung

Diri (APD), bahkan ada juga yang bisa memproduksi ventilator pernafasan.

Upaya apa yang dilakukan untuk memastikan kecukupan anggaran penanganan COVID-19?

Pemerintah akan terus memantau kebutuhan anggaran, dikaitkan dengan proyeksi berapa lama pandemi ini akan terjadi. Semakin lama, dan semakin banyak korban, tentunya akan dibutuhkan lebih banyak anggaran. Sumber pendanaan ini utamanya dari pendapatan dan pembiayaan, serta realokasi dan *refocusing* anggaran K/L dan TKDD. Pemerintah melalui koordinasi dengan *stakeholder* terkait akan terus melakukan pemetaan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19, dan memperkuat perencanaan dan keakuratan kebijakan kesehatan.

Di samping itu, pemerintah akan terus mendorong *refocusing* anggaran K/L untuk mendukung sektor kesehatan, mengingat apabila pandemi berlangsung lebih lama, maka kegiatan K/L tidak dapat berjalan, dan anggarannya dapat direalokasi untuk mendukung intervensi kesehatan.

Berapa total anggaran yang diperoleh setelah refocusing dari K/L dan pemda?

Dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya, telah dilakukan kebijakan penghematan anggaran, baik belanja K/L maupun transfer ke daerah dan dana desa. Untuk penghematannya total K/L sekitar Rp145-an triliun dan untuk pemda sekitar Rp94 triliun. Uang ini digunakan sebagai salah satu sumber dana pemberian stimulus yang berfokus ke tiga hal di awal tadi. Penghematan tersebut di luar kebijakan *refocusing* anggaran K/L dan Pemda untuk mendukung penanganan Kesehatan.

Apakah ke depan akan ada peningkatan anggaran kesehatan?

Sejak 2019, rasio anggaran kesehatan terhadap APBN sebenarnya sudah lebih dari 5 persen, karena kita mengcover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), prasarana dan sarana kesehatan, termasuk dana-dana yang di transfer ke daerah. Jadi fokusnya bukan ke

persentasenya harus sekian tapi lebih kepada program apa yang mau dijalankan, lalu *output* dan *outcome* apa yang mau dituju. Tentu Covid-19 ini menjadi *baseline* dalam persiapan anggaran kesehatan ke depan. Misal dalam pemenuhan fasilitas kesehatan dan perbaikan JKN, baik dari segi layanan maupun sistemnya.

Bagaimana dengan fokus alokasi anggaran kesehatan ke depan?

Ke depan anggaran kesehatan difokuskan untuk reformasi kesehatan. Pertama, mempercepat pemulihan dampak Covid-19 melalui peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan, peralatan kesehatan, dan tenaga kesehatan, serta koordinasi dengan pemda, BUMN/BUMD, dan swasta.

Kedua, penguatan sistem kesehatan, baik *supply* maupun *demand*. Ketiga, penguatan *health security preparedness* melalui penguatan kesiapan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, penguatan *health emergency framework*, dan sistem kesehatan yang terintegrasi.

Apa harapan Bapak untuk implementasi kebijakan penanganan pandemi dan ketahanan APBN?

Pertama, harapan saya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat terus berlanjut, termasuk *sharing the pain* dengan pemda itu penting. Gugus tugas penanganan pandemi sebagai implementasi kebijakan satu pintu juga penting dilanjutkan.

Kemudian kita juga ingin mendukung dunia usaha untuk kesehatan, sehingga kebutuhan alat kesehatan dan farmasi dalam negeri dapat kita penuhi sendiri.

Yang terakhir, dengan adanya pandemi ini seluruh sector kehidupan akan melakukan penyesuaian (yang biasa disebut *new normal*). Mekanisme bekerja, bentuk interaksi dalam masyarakat, dan sebagainya akan menyesuaikan. Termasuk dalam hal pengelolaan APBN. Seharusnya APBN kita dengan *new normal* yang kita jalani saat ini, menjadi *baseline* yang efektif dan efisien dalam proses *recovery* dan reformasi kebijakan fiskal di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.



Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

Foto Dok. Pribadi

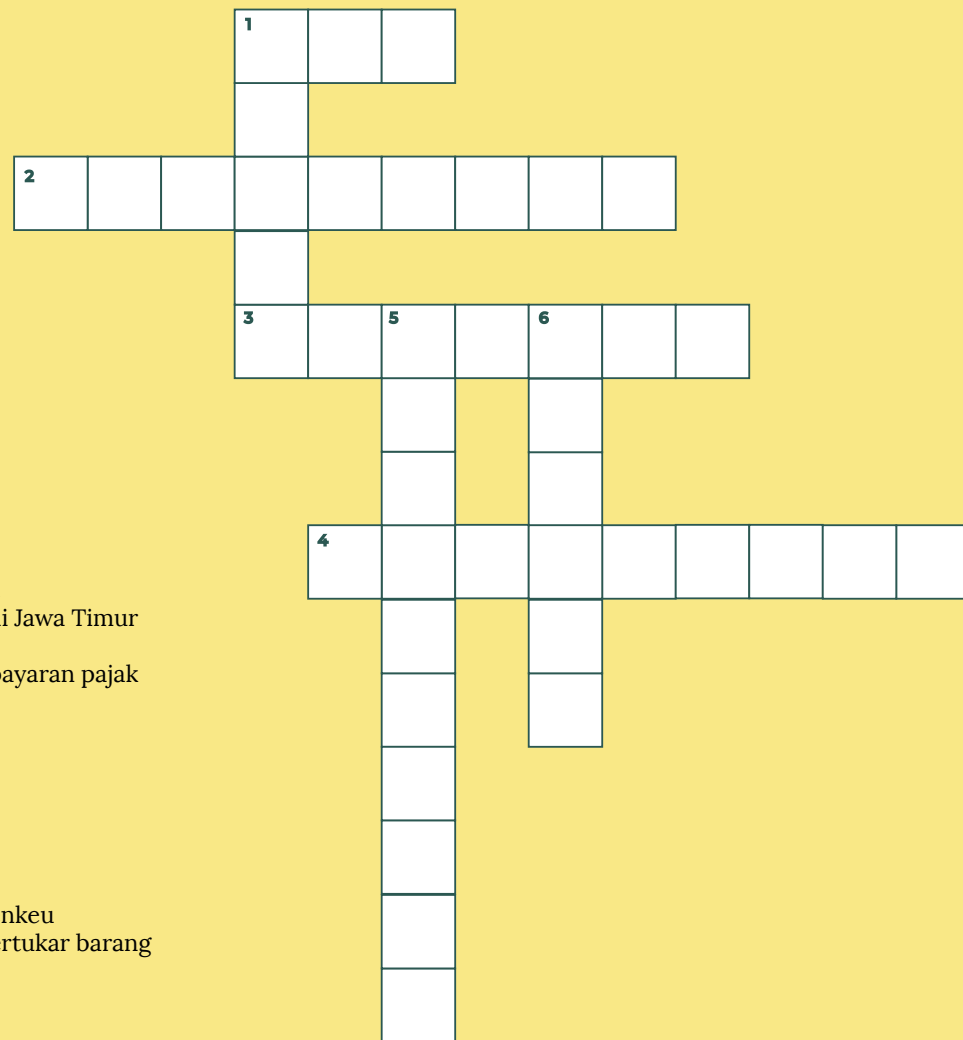
Kala *Rindu* Pasar Malam Tak Lagi Ada

Pasar Malam Kualu Sumatra tak lagi bisa beroperasi sejak pandemic COVID19. Baru seminggu sejak dibuka di kawasan Brayau, Medan, seluruh kegiatan pasar malam harus dihentikan untuk waktu yang tak bisa ditentukan. Atas anjuran pemerintah, segala kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa harus dihentikan. Tak ada lagi suara deru motor Tong Setan yang biasa kita temukan di pasar malam. Tak ada lagi keriuhan suara dari berbagai wahana yang ada. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pasar malam ini kembali mengeluarkan keceriaannya.

Foto dan Teks
Juan Herbert Girsang



Teka *Teki *
Med



Mendatar

- 1. Gerbang Pembayaran Nasional
- 2. Salah satu universitas negeri di Jawa Timur
- 3. Merasa diri mulia, angkuh
- 4. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Menurun

- 1. Genting, Mengkhawatirkan
- 5. Akun media sosial resmi Kemenkeu
- 6. Perdagangan dengan saling bertukar barang

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 Juli 2020.

*Teka *Teki*

Bersenang-senang dengan Hidroponik

Teks Reni Saptati D.I

Bayu Widhi Nugroho, Petani Hidroponik

Foto Dok. Pribadi



Perkenalannya dengan pertanian hidroponik tak disengaja. Batal bertani bawang merah, ia justru tertarik mencoba bercocok tanam tanpa media tanah. Kini Bayu Widhi Nugroho makin asyik berkecimpung di sana. Selain menggeluti usaha hidroponik, ia juga membuat kanal media sosial yang mengulas topik itu dan sukses memiliki ratusan ribu subscriber. Pria kelahiran Cilacap, 33 tahun lalu tersebut membagi pengalamannya dengan Media Keuangan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana awal mula berkenalan dengan dunia hidroponik?

Simbah (nenek) saya itu petani. Saya ikut beliau dari SMA dan sering membantu di sawah. Saya kuliah di jurusan fisika, pun bekerja di bidang *developer game*. Tidak ada hubungannya dengan pertanian. Setelah tahun 2014, baru saya ingin bertani. Waktu itu, saya sengaja keluar dari pekerjaan saya di perusahaan untuk bertani.

Dulu saya tinggal di Parangtritis, sekarang di Sleman. Kalau di Parangtritis itu kan pertanian bawang merah ya, nah kalau di Sleman itu tidak cocok. Saya mencari cara bagaimana supaya bisa tetap menanam bawang merah di kondisi dataran menengah. Sleman dekat Gunung Merapi dan ketinggiannya 300 mdpl. Itu kurang cocok untuk menanam bawang merah.

Akhirnya, saya tidak jadi bertanam bawang merah. Justru kemudian saya bertemu dengan metode hidroponik. Kebutuhan pasar di Jogja kebanyakan selada, jadi saya banyak memproduksi selada. Itu awal mulanya, sekitar tahun 2013-2014.

Anda juga punya beberapa kanal media sosial seputar hidroponik, ya?

Oh, kalau itu, saya memang senang di media sosial dan yang *online-online*

begitu. Saya sendiri juga moderator regional di Kaskus. Tiap kali saya bikin apa begitu, pasti saya *online*-kan.

Nah, di hidroponik ini saya sengaja bikin akun Youtube dan Instagram untuk mengedukasi masyarakat tentang hidroponik. Baik itu cara berhidroponik maupun agar masyarakat tahu saja. Dulu kan belum banyak yang tahu apa itu hidroponik. Itu juga untuk mendukung kegiatan usaha saya.

Seperti apa suka duka menggeluti usaha di bidang hidroponik?

Kalau sukanya banyak. Saya berjualan sayur hidroponik dan memasok ke hotel dan restoran. Kalau dukanya, selama pandemi ini benar-benar tidak ada pesanan karena hotel dan restoran tutup. Saat ini, saya menanam sayuran yang bisa dijual di pasar biasa. Harus fleksibel seperti itu.

Banyak orang yang mulai mencoba hidroponik. Apa yang perlu disiapkan untuk pemula?

Yang perlu dipersiapkan itu peralatan. Ada media tanam *rockwool*, nutrisi sebagai makanan pokok untuk tanaman, *net pot*, dan sebagainya. Itu bisa diganti dengan barang-barang bekas. Ada tutorialnya di kanal Youtube saya.

Nah, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan. Pertama, sinar matahari. Banyak orang menganggap hidroponik tidak membutuhkan sinar matahari, padahal sama saja. Semua tanaman butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Tetapi justru masyarakat sering terbalik pertanyaannya, “Ini boleh terkena sinar matahari tidak?”

Kedua, banyak yang beranggapan bahwa bisnis hidroponik itu sangat menguntungkan. Sebenarnya sama saja dengan bisnis lain. Dan perlu diketahui juga bahwa hidroponik ini ada skala hobi, skala rumahan, dan skala industri. Ketiga skala itu berbeda baik caranya maupun hasilnya. Jika langsung berinvestasi besar-besaran tapi belum tahu caranya dan belum tahu pasarnya, dikhawatirkan nanti gagal.

Untuk yang skala rumahan, kira-kira berapa besar modal awalnya?

Ini memang paling banyak ditanyakan. Tergantung mau seperti apa yang dibuat. Kemarin saya membuat tutorial menggunakan *box* buah bekas dan hasil panennya juga bagus. Harga *box* buah bekas itu sekitar Rp5000-10.000.

Nah, nutrisi yang paling pokok, maksimal harganya Rp25.000. Potnya bisa pakai gelas mineral bekas dan kain flanel. Satu *slab* media tanam *rockwool* cuma Rp60.000 dan bisa jadi 600 potong. Jadi, kalau ditanya minimal berapa modalnya, kurang dari Rp100.000 sebenarnya sudah bisa (bertanam hidroponik).

Bagaimana Anda melihat hidroponik untuk meningkatkan ketahanan pangan?

Cocok, terutama buat skala rumahan yang nanti hasilnya dikonsumsi sendiri. Minimal tidak usah belanja. Di pasar juga kadang kekurangan beberapa *item* sayuran. Kita bisa menanam sendiri, paling tidak bisa mengirit biaya pengeluaran.

Saya optimis hidroponik ini bisa mendorong ketahanan pangan. Yang saya lakukan sekarang kan seperti itu juga, yaitu menyuplai sayuran untuk masyarakat setiap harinya.



Hasil panen Hidroponik yang ditanam oleh Bayu Widhi Nugroho

Foto Dok. Pribadi

Apa saja manfaat lain yang didapat dari hidroponik selain hasil panennya?

Untuk skala rumahan, kita bisa mengisi waktu. Melihat yang hijau-hijau itu bikin bahagia. Dan yang jelas, kita jadi tahu kualitas sayurannya karena kita tanam sendiri. Bisa tahu prosesnya dari awal sampai akhir, disemprot pestisida atau tidak, kita jadi tahu perbedaannya. Berbeda kalau beli di pasar, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Hidroponik ini bisa buat bersenang-senang.

Seberapa lama hingga bisa panen sayuran?

Berbeda-beda. Sayuran daun seperti kangkung, sawi, pakcoy, dan bayam rata-rata kurang dari 30 hari setelah pindah tanam. Tidak sampai bulanan, kecuali seperti seledri biasanya tiga bulan. Namun, setelah tiga bulan itu, seledri bisa dipanen setiap hari asal perawatannya bagus.

Saya sendiri juga menanam selada. Untuk memanen butuh sekitar 55 hari, meliputi 15 hari disemai, 20 hari peremajaan, dan 20 hari pembesaran.

Kita harus memperhatikan jangka waktu panen. Nah, anaknya di hidroponik itu tidak ada proses membalik tanah. Kita tinggal membersihkan instalasinya, lalu

bisa menanam lagi. Tidak semua instalasi harus dibersihkan, cukup yang tadi dipanen saja untuk diberi tanaman baru.

Apakah ada komunitas petani hidroponik?

Ada komunitasnya, tetapi lebih ke petani skala rumahan. Petani-petani besar banyak yang tidak ikut komunitas. Komunitas ini cukup sering membuat *gathering*. Kita juga ada grup Facebook yang anggotanya dari beberapa kota. Dari situ kita saling kenal dan membuat *gathering*. Tidak harus dalam bentuk acara formal.

Apakah ada kerja sama dengan Dinas Pertanian?

Saya sering diminta Dinas Pertanian untuk mengisi pelatihan, terutama di Sleman. Dinas Pertanian berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hidroponik, terutama skala rumahan, untuk meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.

Apa harapan Anda terhadap dunia hidroponik di Indonesia?

Hidroponik ini menjadi inovasi di pertanian. Sistem hidroponik ini sangat cocok diterapkan di Indonesia. Dengan

hidroponik, kita bisa mendapat dua keunggulan sekaligus.

Pertama, tenaga kerja menjadi lebih efisien. Kedua, kita bisa menanam secara kontinu. Kita bisa panen setiap hari. Hanya saja, hidroponik ini berbeda dengan di tanah, butuh upaya mengelola lebih supaya panen bisa kontinu. Hal itu dibutuhkan di pertanian Indonesia. Saya berharap hidroponik menjadi inovasi pertanian kita.

Ada pesan untuk masyarakat yang ingin mencoba metode hidroponik?

Hidroponik itu mudah dan simpel. Jadi, jangan sampai nanti berhidroponik malah kita jadi susah atau repot. Kalau jadi merasa lebih repot, mungkin bisa mencoba menanam di tanah juga. Sama-sama menanam, tumbuh, dan bisa dikonsumsi.

Hidroponik itu simpel, silakan cek tutorialnya di kanal Youtube saya Hidroponikpedia. Ada yang memakai botol bekas, *box* buah bekas, dan jeriken. Itu untuk skala rumahan. Namun diperhatikan juga, untuk skala industri ya harus beda lagi caranya.

INSPEKTORAT VII, INSPEKTOR JENDERAL

Khasiat Memangkas Sekat

Teks A. Wirananda



Alexander Zulkamain, Inspektur VII, Itjen

Fasilitas di Inspektorat VII, Itjen

Foto Dok. Itjen

*Dari mana datangnya cinta,
Darilah mata turun ke hati.*

Penggalan lirik Keroncong Kemayoran ini seolah mengatakan bahwa yang dilirik mata seringkali punya peran besar atas apa yang terjadi di dalam dada. Plus, situasi di dalam dada seringkali punya pengaruh besar atas produktivitas seseorang. Hati yang bersukacita umumnya meningkatkan gairah bekerja. Hal serupa itulah yang agaknya diyakini oleh Alexander Zulkarnain, Inspektur VII di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, ruang kerja tanpa sekat, kesetaraan antarindividu, dan suasana santai, punya dampak yang baik untuk produktivitas di Inspektorat VII. "Kreativitas bisa tumbuh subur karena suasana yang seperti itu (ruang kerja tanpa sekat)," ujarnya.

Tangkas menanggapi perubahan

Bekerja kantoran tak lagi melulu identik dengan orang-orang yang duduk menunduk di hadapan komputer. Perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi mendesak pola kerja turut beradaptasi. Tempat, budaya, bahkan metode bekerja dipaksa untuk mampu menyesuaikan diri.

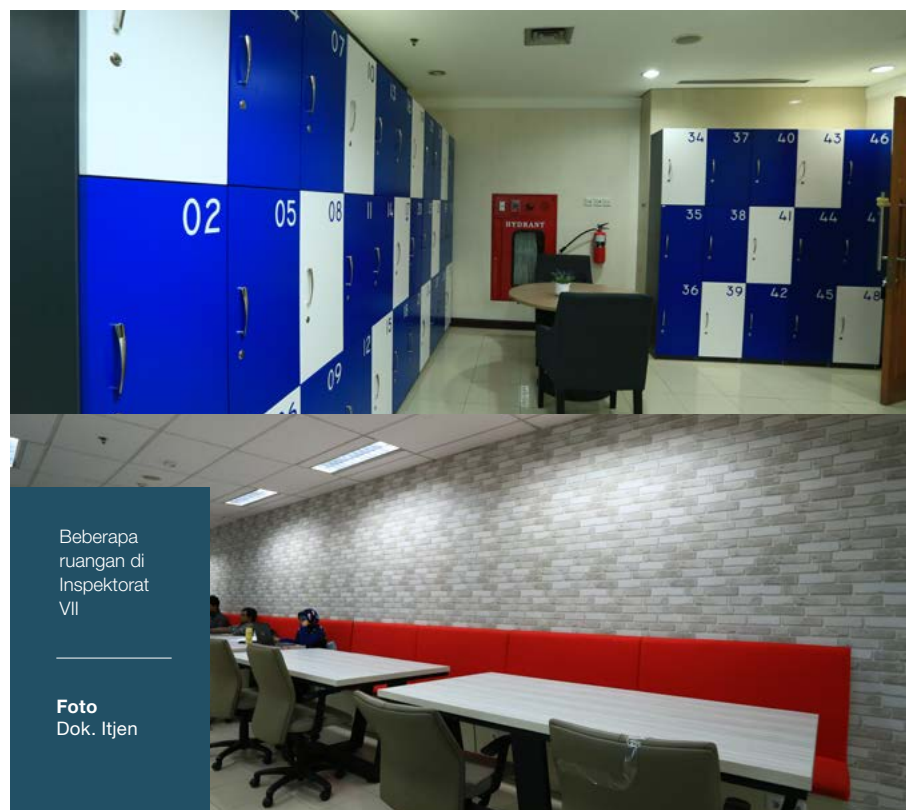
Setahun silam, Inspektorat VII gesit bergerak menanggapi perubahan itu. Perlahan-lahan, mereka mulai membangun pola dan budaya kerja yang baru. Mulai dari menata ulang ruang kerja, sampai melenturkan sekat birokrasi di dalamnya. Inspektorat VII menerapkan ruang kerja berbasis aktivitas (*Activity Based Workplace*). Ruang kerja jenis ini ditandai dengan tidak adanya ruang pemisah antara staf dan pejabat.

Perubahan tata ruang ini mau tak mau memantik perubahan pola interaksi antarmanusia di dalamnya. Hubungan birokratis antara staf dan pejabat perlahan terkikis. Ketiadaan batas antarpegawai juga menyuburkan hubungan sosial yang harmonis. Alexander Zulkarnain mengatakan ruang kerja tanpa sekat ini memunculkan kesan setara. “Suasana egaliter itu membuat semua ide bisa muncul dan digosok,” ujarnya. Penerapan ruang kerja berbasis aktivitas, kata pria yang disapa Alex ini, dapat memicu orang untuk tak segan mengungkapkan sekaligus mempertanyakan ide. Baginya, itu poin penting. “Ide itu kayak berlian. Intan itu mau jadi berlian harus digosok dengan keras. Tidak bisa digosok pakai barang yang lunak,” ujarnya. Perlahan, budaya kerja baru yang lebih dinamis mulai berjalan.

Kelahiran ide beserta aneka rupa proses menempanya secara bersama-sama, merupakan bagian penting di Inspektorat VII. Pematangan ide ini tentu tak dapat dilepaskan dari keseharian Inspektorat VII yang mengemban tugas penelitian dan pengembangan (litbang) dalam lingkup pengawasan internal. Selain litbang, Inspektorat VII juga mengemban tugas sebagai auditor internal bagi Inspektorat Jenderal, koordinator Unit Kepatuhan Internal Kemenkeu, pengawas internal bidang teknologi informasi, koordinator pengembangan profesi auditor, serta koordinator penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan telaah sejawat (*peer review*).

Bukan tanpa perlawanan

Tak ada perubahan yang luput dari perlawanan. Lumrah. Sebab, secara bersamaan, setiap perubahan selalu mengancam kenyamanan sebagian pihak. Menurut Alex, perubahan budaya



Beberapa ruangan di Inspektorat VII

Foto Dok. Itjen

kerja yang terjadi di Inspektorat VII pun bukan tanpa kendala.

Pada masa awal penerapan, Alex mengatakan sempat muncul beberapa kekhawatiran tentang implementasi ruang kerja baru ini. Namun, menurutnya, secara umum tidak ada kendala berarti. Ia menduga, kekhawatiran segelintir orang karena belum adanya pemahaman tentang konsep yang diusung. “Karena belum tahu konsepnya,” ujarnya.

Implementasi ruang kerja berbasis aktivitas di Inspektorat Jenderal berlangsung di beberapa inspektorat. Namun, Alex berkisah bahwa salah satu yang paling mulus dan signifikan berubah adalah Inspektorat VII. Menurutnya, perubahan yang terbilang mulus tak luput dari pengaruh pemikiran-pemikiran progresif orang-orang di dalam Inspektorat VII. “Mungkin karena auditor madyanya orang-orang maju kali. Orang-orang yang bisa menerima perubahan,” katanya menduga.

Tahan benturan

Konsep ruang kerja berbasis aktivitas memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kehadiran bukan penentu keluaran kinerja. Fleksibilitas semacam itu membuat Inspektorat VII lebih mudah beradaptasi di tengah pandemi.

Alex mengatakan, perubahan pola bekerja tak memberikan dampak signifikan pada pola bekerja dan keluaran pekerjaan timnya. Bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor nyaris bisa disetarakan. Beberapa pekerjaan yang mempersyaratkan kehadiran masih terimbas kendati tak signifikan. “Paling, kalau tidak ada *Work From Home* (dampak pandemi COVID-19), itu bisa lebih cepat,” ia melanjutkan, “sekarang sedikit lebih lambat. Sedikit saja lebih lambat.”

Ia bahkan menambahkan, tak menutup kemungkinan bahwa pola bekerja di situasi darurat saat ini kelak akan jadi situasi normal baru bagi pegawai Kementerian Keuangan. “Kondisi normal baru kita jangan-jangan seperti ini,” katanya sembari berkelakar.

Bagaimana Caranya?



APA SAJA PERSYARATAN BEASISWA REGULER LPDP?



Sasaran Pendaftar
Masyarakat Umum



Syarat Bahasa

Magister DN: TOEFL ITP 500 | TOEIC 630 | iBT 61 | IELTS 6.0 | TOAFL 500

Magister LN: TOEIC 800 | TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5 | TOAFL 550

Doktoral DN: TOEFL ITP 530 | TOEIC 700 | iBT 70 | IELTS 6.0 | TOAFL 530

Doktoral LN: TOEIC 850 | TOEFL iBT 94 | IELTS 7.0 | TOAFL 550



Usia Pendaftar

Magister : 35 Tahun
Doktoral : 40 tahun



IPK Minimal

Magister : 3.00 skala 4.0
Doktoral : 3.25 skala 4.0
(Wajib LoA Unconditional)

Ketentuan Lain

Untuk Program Doktoral wajib memiliki LoA unconditional dan tidak ada seleksi berbasis komputer

Perguruan Tinggi Tujuan

bit.ly/unduhLPDP2019

Untuk lebih lanjut hubungi:

1500652

www.lpdp.kemenkeu.go.id

Liku Langkah untuk Terus Maju

Teks Dimach Putra Foto Humas DJBC



UNTING BASUKI
Direktur Fasilitas Kepabeanan,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Banyak jalan menuju Roma. Sepenggal pepatah yang sering kita dengar untuk menggambarkan berjuta cara mencapai suatu tujuan. Tapi tak seorang pun berkata bahwa jalan manapun yang dipilih, harus dilalui penuh liku.

Setidaknya itu yang dirasakan oleh Untung Basuki. Pria sederhana ini telah melalui tempaan selama hampir tiga dasawarsa kariernya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berbagai jabatan dengan ragam bidang keahlian telah ia lalui. Pengalaman berharga tersebut menempanya dengan baik sehingga kini ia dipercaya menjadi Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pelajaran dari setiap peran

Basuki, begitu ia biasa disapa. Pria berusia 48 tahun ini terdaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenkeu sejak tahun 1990. “Zaman dulu tahun kedua pendidikan statusnya sudah CPNS,” buka Basuki, “Saya dari Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai di STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, -red).”

Ia lulus dari program pendidikan diploma tersebut di tahun 1992. Basuki kemudian menerima Surat Keputusan (SK) Penempatan pertama di tahun berikutnya untuk bertugas di Direktorat Kepabeanan, DJBC. Di unit kerja ini, Basuki muda melewati hampir enam tahun penuh makna yang menjadi pondasi kuat bagi kariernya ke depan. “Terlebih, unit ini jadi cikal bakal Direktorat Fasilitas Kepabeanan yang sekarang saya tempati,” ungkapnya.

Dari kantor pusat, Basuki lalu mendapat promosi menjadi Kasubsie (Eselon V) di KPBC Bandar Lampung. Di posisi barunya ini, ia mendapat pengalaman terjun langsung ke lapangan setelah sebelumnya banyak berkulat di *back office*. Empat tahun

ia habiskan di Kota Tapis Berseri ini. Saat bertugas di sana pula, pria asal Purwokerto ini menikah dan dikaruniai putera pertama.

Puas terjun di lapangan, ia lalu ditarik kembali ke kantor pusat untuk mendapat promosi menjadi Kepala Subbagian Pembakuan Prestasi dan Sarana Kerja (PPSK). Tantangan baru kembali diterimanya sebagai pengelola di bidang organisasi dan ketatalaksanaan. Di sana ia mengabdikan dua tahun, lalu mutasi ke Tanjung Priok menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen. “Jadi macem-macem, dari lapangan, lalu ngurusin organisasi, terus ke lapangan lagi di pelabuhan,” serunya sambil terkekeh.

Kaya pengalaman sarat kesan

Bagi Basuki tiap posisi yang pernah ia tempati memiliki tantangan dan keunikan masing-masing. Tak hanya beragam dalam hal jenis profesi yang ia geluti, proses mutasi dan promosi yang dilaluinya juga telah membawanya bertugas ke penjuru Indonesia. Salah satu daerah yang paling berkesan baginya adalah kota Makassar. Di sana, ia pernah ditempatkan tiga kali dengan jenis tanggung jawab dan level jabatan yang berbeda.

Jabatan pertama yang ia ampu di Bumi Angin Mamiri adalah

Kepala Subbagian Kepegawaian di Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Sulawesi. Jabatan sebagai Kepala Subbidang Penindakan di tempat yang sama ia emban setelah hanya enam bulan merasakan promosi jabatan Eselon III pertamanya di Kanwil Jawa Timur II yang baru dibentuk di Malang. Terakhir, sekitar tahun 2018 lalu, ia dipercaya menjadi Kepala Kanwil Sulawesi Bagian Selatan. “Berkesan diberi pengalaman seperti itu karena tiap posisi yang saya tempati punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda,” jelas bapak tiga anak ini.

Batam dan Bali juga tak kalah memberi pengalaman berkesan bagi Basuki. Dua daerah tersebut mengharuskan tanggung jawabnya meliputi pengawasan daerah perbatasan, meski dalam level yang berbeda. Di Batam, ia menjabat Kepala Kantor Pelayanan Utama BC Batam dengan wilayah perairan yang berbatasan dengan Singapura.

Sedangkan di Bali, ia dipercaya menjadi Kepala Kanwil DJBC Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu kantor yang ada dalam pengawasannya, KPBC Atambua, memiliki tanggung jawab menjaga perbatasan RI-Timor Leste. “Di BC Bali Nusra ‘gak sampai setahun, maka dari itu saya selalu membiasakan tiap diberi kepercayaan memimpin di suatu wilayah saya usahakan untuk mengunjungi tiap kantor di bawah (kantor vertikal),” bebarnya, kemudian dilanjut, “Agar punya gambaran wilayah dan tantangan yang dihadapi.”



Lebih dari sekadar adaptasi

“Bagi teman-teman pegawai Kemenkeu yang memiliki unit vertikal, tentu kecepatan adaptasi itu sangat penting,” tuturnya membagi kiat. Hal ini bukan hanya isapan jempol belaka. Basuki merasakan betul pentingnya *soft skill* tersebut bagi dirinya yang sangat sering ditempatkan di wilayah berbeda-beda dengan berbagai jabatan dengan tanggung jawab yang berbeda pula.

Tentu hal itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Beradaptasi dengan lingkungan dan jenis pekerjaan baru harus dilakukannya dalam tempo singkat. Bagi Basuki hal tersebut sejatinya berlaku juga bagi seluruh pegawai, terlepas memiliki unit vertikal atau pusat. “Karena kita tidak bisa memilih atasan, *peer* maupun anggota kita siapa. Pun jenis pekerjaannya,” ucapnya bersemangat.

Langkah penting berikutnya, sejalan dengan proses adaptasi adalah kemampuan dalam melakukan *teamwork*. Mampu bekerja sama dalam tim menjadi vital bagi pegawai di sebuah organisasi yang sangat dinamis dan terus berubah. Langkah tersebut membuat kita sadar akan tanggung jawab dari peran yang kita kerjakan. Kerja sama yang baik juga mendorong terciptanya *networking* yang baik pula dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita.

Keluarga sumber motivasi dan inspirasi

Tantangan paling berat bagi seseorang yang sering ditugaskan dengan penempatan daerah adalah berpisah dengan keluarga yang dicintainya. Hal itu diamini oleh Basuki yang paham betul susahnya menjalani itu semua. Di awal-awal karier memang terasa mudah karena keluarga masih bisa ikut ke tempat bertugas. Tapi seiring tumbuh kembang anak yang memasuki usia sekolah, ego orang tua kadang harus mampu diredam.



Untung saat menjadi pimpinan upacara di Kanwil DJBC Bali dan Nusatenggara

Foto Humas Kanwil DJBC Bali dan Nusa Tenggara

Basuki merasa bahwa semakin besar anaknya, semakin mereka membutuhkan kestabilan tempat tinggal. Jika harus mengikuti kepindahannya yang tak menentu, bisa lama atau sekejap, khawatir akan mempengaruhi kestabilan prestasi di sekolah. Tak jarang ia memutuskan pergi bertugas ke daerah tanpa didampingi istri dan anak-anaknya.

“Keluarga selalu jadi sumber motivasi dan insprasi saya. Mereka adalah tujuan kita bekerja dan tempat kita kembali setelah lelah bekerja,” ujarnya. Basuki lalu mengingatkan tentang pentingnya pemahaman tersebut dari awal berkarier. Tentang pentingnya keseimbangan antara karier dan kehidupan personal, dalam hal ini hubungan dengan keluarga di rumah. Menurutnya, semakin tinggi suatu jabatan, tanggung jawabnya semakin menantang. “Dan tidak selamanya kita di atas, makanya butuh *support* dan motivasi dari orang terdekat, buat saya ya dari istri dan anak-anak,” tuturnya sambil tersenyum simpul.

Perhatian untuk keluarga bagi

Basuki memang sudah tak bisa ditawar. Kebahagiaannya sesederhana mengantar anak ke toko buku untuk membeli kebutuhan sang buah hati. Jika tidak bisa hadir secara fisik, kini teknologi bisa menjadi penyambung perhatian berupa pesan singkat, panggilan telepon, dan video. Yang terpenting adalah kualitas dari perhatian yang diberikan.

Seperti halnya anak, Basuki juga menganggap tumbuh kembang organisasi yang dinamis juga harus diperhatikan dengan seksama. Perubahan datang dengan cepat membawa hal-hal yang kadang tak terduga. Sebagai orang di dalamnya, terutama pemimpin, harus mampu untuk terus beradaptasi dengan baik. Bagi Basuki, kunci keberhasilan menghadapi perubahan adalah pada kekuatan sumber daya manusia yang didukung oleh teknologi informasi. “Dengan dua hal itu saya yakin teman-teman semua dapat membawa Kementerian Keuangan menjadi organisasi yang semakin dipercaya oleh masyarakat,” tutupnya penuh keyakinan.

Buku

PERJAMUAN KHONG GUAN: *Suguhan Puisi ala Joko Pinurbo*

Peresensi Krishna Pandu Pradana

Siapa yang tidak mengenal warna merah menyala serta gambar ciri khas dari satu kaleng biskuit Khong Guan yang tak pernah lengkap anggota keluarganya, hanya ada Ibu, Kakak, dan Adik. Sementara itu, posisi Ayah hingga kini masih menjadi misteri. Bisa dikatakan juga hampir seluruh anak-anak di Indonesia pada masa kecilnya pastilah mencari sesuatu yang jumlahnya terbatas dalam kaleng tersebut. Ya, itu adalah wafer khas Khong Guan yang ada hanya beberapa saja dalam tumpukan kaleng biskuit tersebut. Kaleng biskuit ukuran besar ini bisa ditemukan ketika silaturahmi di setiap rumah menjelang lebaran.

Akan tetapi, penulis tidak sedang membicarakan aneka rupa isi biskuit dalam buku ini. Joko Pinurbo atau Jokpin, begitu ia disapa, selalu memberikan kejutan dalam sajak dan lirik dalam puisi-puisinya. Buku yang diberi judul *Perjamuan Khong Ghuan* ini terasa sangat mengena di hati pembaca. Nyatanya, puisi-puisinya selalu konsisten dan banyak menggambarkan ironi-ironi hidup manusia sehari-hari yang diungkapkan dengan bahasa yang ringan. Tak pernah lepas gaya sajaknya yang bercerita dan bisa dianggap juga sebagai cerita mini bagi yang senang dengan alunan kata sederhana.

Jokpin menganalogikan kumpulan puisinya ini sebagai isi dari kaleng dalam

biskuit Khong Ghuan yang berisi 80 bait puisi dari tahun 2017-2019. Perjamuan Khong Ghuan berisi empat kaleng. Kaleng satu berisi puisi-puisi yang merespons keseharian manusia teralienasi dengan kemanusiaannya akibat kerja, perkembangan zaman, dan teknologi



digital.

Kaleng kedua, Jokpin menggunakan analogi menyentil dan dominasi majas personifikasi mengajak pembaca berjalan mengikuti alur. Terbahak, berdecak bahkan malu kena sindir.

Ketika kita masuk kepada kaleng ketiga ada yang unik dari tokoh wanita yang ada dalam puisi-puisi Jokpin, yaitu Minnah. Tokoh Minnah, entah risetnya sangat mendalam atau suatu kebetulan saja, yang jelas nama tersebut bukan nama wanita asli Indonesia melainkan seperti nama artis cantik Korea yang menjadi pemain serial

drama tersohor di negerinya. Banyak kisah mendalam yang disampaikan Jokpin bersama dengan tokoh Minnah ini. Sederhana dalam penyajian tokoh dalam puisinya yaitu aktifitas dari mulai bangun tidur hingga malam hari.

Kalau ingin menemukan dimana letak Perjamuan Khong Guan, Jokpin menuliskannya di kaleng keempat.

Semakin membaca puisi-puisinya semakin pembaca seolah di bawa untuk melihat isi hati Khong Guan. Di sini letak misteri dari sang Ayah Khong Ghuan dikulik habis oleh Jokpin. Menarik, sekaligus menghibur pembaca bahkan sampai tertawa geli setiap membaca lembar demi lembar puisi yang disampaikan oleh penulis dengan tutur kata yang mudah dicerna.

Ada juga cerita yang menarik dalam puisi Jokpin dan sangat relevan pada era *the new normal* ini. Puisinya yang bertajuk “Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya” ini menggambarkan banyak sekali orang-orang berlomba dengan teknologi serta waktu hingga lupa dari mana harusnya ia berpijak. Sepenggal puisi ini mengingatkan manusia untuk tetap kembali kepadanya khithahnya.

Selamat membaca!

Judul:
Perjamuan Khong Guan:
Kumpulan Puisi

Penulis / Penerjemah:
Joko Pinurbo

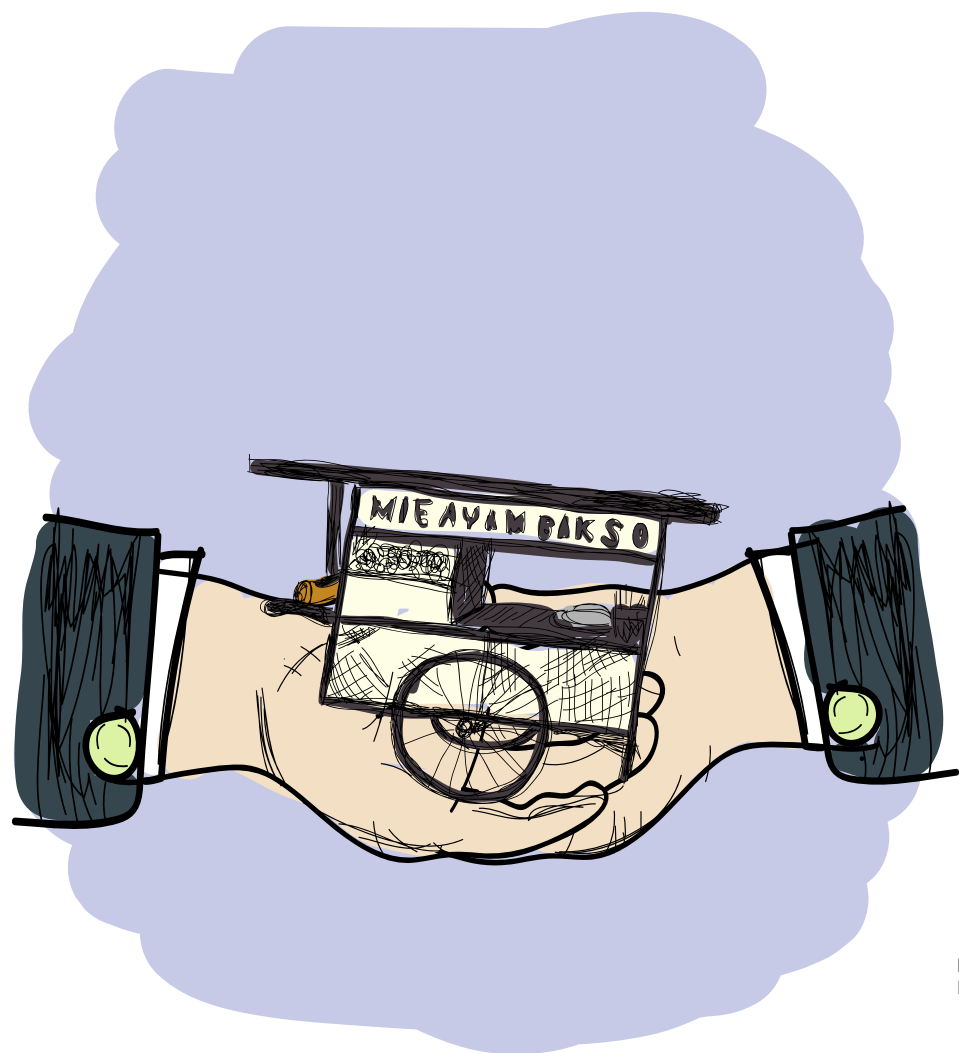
Tahun Terbit:
Januari 2020

Dimensi:
130 Halaman

PENGUATAN UMKM DI TENGAH

Risiko Resesi Ekonomi

Teks | Gede Gittha Adhi Pramana,
pegawai Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN



Ilustrasi
Dimach Putra

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 dari UMKM mencapai 116,7

juta tenaga kerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang diserap unit usaha di Indonesia.

UMKM juga telah terbukti mampu bertahan pada krisis ekonomi Indonesia. Sekitar 96 persen UMKM bertahan dari goncangan krisis moneter 1997/1998 dan 2008/2009. Data Badan Pusat

Statistik (BPS) menunjukkan pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998, jumlah UMKM di Indonesia malah menunjukkan tren yang meningkat.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2017), populasi pelaku UMKM sebesar 62,92 juta atau 99,9 persen dari total pelaku

usaha. Sektor UMKM juga bisa disebut pahlawan devisa karena banyak memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal serta minim bergantung pada komponen impor.

Sektor UMKM juga memiliki *multiplier effect* yang tinggi dalam menekan ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, UMKM berperan serta dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari beragam kontribusi di atas, dapat kita lihat bahwa sektor UMKM berkontribusi dalam penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, sektor UMKM dapat dinyatakan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Namun demikian, berbagai tantangan dihadapi oleh sektor UMKM baik dari sisi internal maupun eksternal. Akses permodalan, pemahaman yang rendah terhadap teknologi produksi, dan pemasaran serta aspek legal dan akuntabilitas menjadi tantangan dari sisi internal.

Sementara itu, hambatan yang dihadapi UMKM untuk berkembang dari sisi eksternal antara lain iklim usaha belum kondusif, keterbatasan infrastruktur, kesulitan akses bahan baku, serta aspek teknologi informasi.

Dalam mengatasi tantangan di atas diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setidaknya ada 3 hal yang perlu menjadi fokus pemerintah dalam penguatan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia:

Pertama, dukungan permodalan.

Laju pertumbuhan UMKM yang tinggi tidak sebanding dengan kemudahan akses permodalan. Saat ini, UMKM banyak bergantung pada pembiayaan dari dana APBN seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Pembiayaan APBN memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan modal UMKM yang tinggi. Dengan demikian perlu terobosan-

terobosan baru untuk pembiayaan non APBN atau dengan menciptakan kemudahan akses pendanaan UMKM dari lembaga keuangan

Kedua, dukungan pembinaan.

Selain permodalan, dukungan dari sisi pembinaan juga penting dalam meningkatkan kualitas UMKM. Kementerian Keuangan menginisiasi program pembiayaan terpadu dengan pendampingan melalui program UMi. Dalam program tersebut, PIP menyalurkan pinjaman kepada mitra yakni PT PNM (Persero), PT Pegadaian (Persero) dan PT BAV. Selain menyalurkan, mitra juga diwajibkan memberikan pendampingan kepada nasabah.

Program semacam ini perlu dikembangkan dengan meningkatkan peran dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menguatkan peran BUMN sebagai *agent of development*. Alternatif lainnya adalah melalui program pendampingan UMKM oleh mahasiswa sebagai bagian program terpadu dari kampus. Dengan adanya akses pembiayaan dan kemampuan dalam mengelola bisnis yang baik, UMKM diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar bisa naik kelas.

Terakhir adalah **penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif**. Upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh yang meliputi:

penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha serta menjamin kepastian usaha disertai efisiensi ekonomi;

pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia;

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan

menengah (UKM); dan

pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.

Perlu adanya database nasabah penerima program pemerintah untuk meminimalisir irisan nasabah antar program. Dengan demikian, dapat memberikan kesempatan pelaku usaha lain sehingga tercipta iklim usaha UMKM yang kondusif.

Dalam *Global Economic Risks and Implications for Indonesia Reports* yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia diprediksi terdampak resesi ekonomi global. Bank dunia memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia di tahun 2019 menjadi 5,1persen. Pada 2020, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,9 persen dan pada 2022 tumbuh 4,6 persen.

Bercermin pada krisis ekonomi tahun 1998, sudah sewajarnya jika Indonesia menguatkan sektor UMKM melalui penyediaan akses permodalan, pembinaan/mentoring, dan penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas UMKM agar berdaya saing di kancah nasional dan global terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Keberhasilan dalam penguatan dan pemberdayaan UMKM pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan serta memperkuat daya tahan terhadap ancaman resesi global.

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Rupa Loka Batik Dari Dana Fisik

Foto dan Teks Resha Aditya Pratama



Total Pengrajin
Batik Tulis

6.526

Total Unit Usaha
Batik Tulis

933

Total Anggaran pada
APBN Pusat

Rp3,8 m

Total DAK Fisik

Rp2 m

**PASAR RAKYAT
17 AGUSTUS
KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR**

Terletak di Kabupaten Pamekasan, Madura, Pasar 17 Agustus dikukuhkan sebagai pasar batik tulis tradisional terbesar di Indonesia. Terdapat sekitar 6.526 pengrajin batik tulis yang tersebar di 38 sentra batik di Pasar 17 Agustus. Lalu ada 933 unit usaha batik pada 38 sentra batik disini. Dikarenakan pasar ini merupakan salah satu pusat perekonomian di daerah Pamekasan, maka pemerintah daerah Pamekasan melakukan revitalisasi pasar. Revitalisasi Pasar 17 Agustus ini menggunakan

sumber dana APBN dan APBD pada tahun 2019. Anggaran APBN Pusat berasal dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp3,8 miliar dan anggaran APBD Pamekasan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp2 miliar. DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dengan prioritas nasional. Dengan adanya revitalisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah Pamekasan.



INSENTIF PAJAK

Pembasmi Pandemi

Teks Riza Almanfaluthi,
pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Bermula dari Wuhan pada akhir Desember 2019, Corona Virus Disease (COVID-19) menyebar ke seluruh penjuru mata angin dan belum usai sampai dituliskannya artikel ini pada awal Mei 2020. Lebih dari 3,7 juta orang di seluruh dunia terinfeksi dan tak kurang dari 258 ribu orang di antaranya meninggal dunia.

Tentu saja wabah global ini memukul pertumbuhan ekonomi dunia. IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. The Economist Intelligence Unit memperkirakan skenario terburuk sampai pada -2,2persen. Indonesia pun tidak luput dari bencana global ini, yang apabila dampaknya tidak ditangani dengan serius akan mengakibatkan kerusakan sangat parah di setiap lini kehidupan, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang kehilangan penghasilannya.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta (Senin, 20/04/2020) sampai mengutarakan kemendesakan situasi dan tindakan yang harus dilakukan oleh Kementerian terkait seperti

Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. Intinya, Presiden meminta agar bantuan sosial harus segera turun pada pekan ketiga April 2020 tersebut.

Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam bantuan sosial itu tak lepas dari perannya sebagai bendahara negara yang mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk mencegah krisis ekonomi dan keuangan. Angka tersebut antara lain digunakan untuk intervensi penanggulangan melalui insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan sebesar Rp75 triliun, program jaring pengaman sosial masyarakat sebesar Rp110 triliun, sektor industri melalui insentif perpajakan dan stimulus Kredit usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp70,1 triliun, dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun.

Cahaya di ujung terowongan

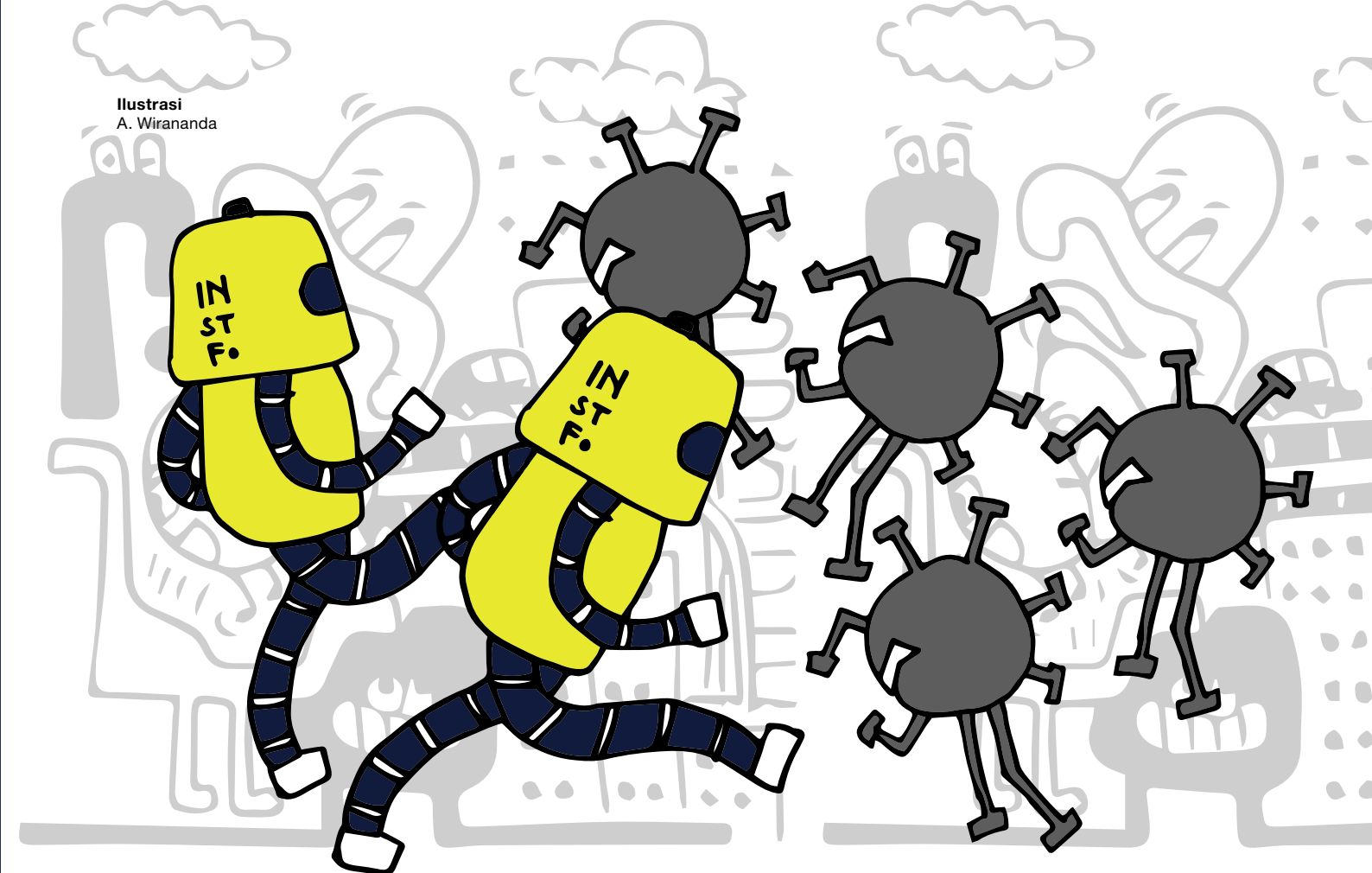
Yang menarik dari senarai di atas adalah dinamika insentif pajak yang secara beruntun diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah

Virus Corona dan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019. Bahkan kebijakan terkini adalah PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memberikan perluasan insentif pajak dan mencabut PMK Nomor 23/PMK.03/2020 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

Ketiga PMK ini sejatinya merupakan bentuk respons cepat Kementerian Keuangan atas telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PMK 44/2020 menyebutkan ada lima fasilitas pajak yang disediakan pemerintah selama 6 bulan berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Ilustrasi
A. Wirananda



Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30persen, dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. PMK 44/2020 ini memperbanyak sektor usaha yang mendapatkan insentif. Contohnya insentif PPh Pasal 21 DTP yang pemberiannya diperluas kepada 1062 sektor usaha. Masyarakat mengakses situs web pajak.go.id untuk mendapatkan insentif itu secara daring.

Kelima insentif pajak ini bisa diibaratkan seperti cahaya di ujung terowongan. Kita ingin daya beli masyarakat dapat dipertahankan melalui tambahan penghasilan bagi para pekerja dan UMKM, laju impor ajeg buat industri karena adanya stimulus, stabilitas ekonomi dalam negeri dapat terjaga, ekspor dapat meningkat, dan

manajemen kas lebih optimal.

Memperkuat garis depan

Dibandingkan PMK 44/2020 yang insentif pajaknya lebih menitikberatkan pada pemulihan sektor terdampak, maka insentif pajak dalam PMK 28/2020 lebih difokuskan untuk memperkuat garis depan di medan juang pembasmian COVID-19. Hakikinya agar barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan wabah mudah diperoleh dan tersedia dengan cepat. Kita sadari bahwa pemenuhannya berkejaran dengan waktu. Tidak boleh main-main dan lambat karena ini menyangkut nyawa 270 juta rakyat Indonesia. Barang-barang itu seperti obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien. Sedangkan jasa seperti jasa konstruksi, konsultasi, teknik, manajemen,

persewaan, dan jasa pendukung lainnya.

Insentif pajak dalam PMK 28/2020 ini juga lebih variatif, yaitu **PPN Tidak Dipungut** atas impor barang, **PPN DTP** atas jasa dari luar daerah pabean, **PPN DTP** atas penyerahan barang di dalam daerah pabean, dan **pembebasan PPN** atas impor barang yang digunakan untuk pemanfaatan jasa. Yang lainnya adalah insentif pajak berupa pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor serta pembebasan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Insentif ini diberikan selama 6 (enam) masa pajak mulai April sampai dengan September 2020. Tidak perlu lama karena kita semua juga ingin wabah ini segera berakhir agar kita bisa membangun dan menata kembali negeri ini.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Pahami Manusia Lewat Musik

Teks CS. Purwowidhu

Sebagian besar kita mungkin akrab dengan musik Jazz, yang berasal dari New Orleans, sebuah kampung di New York. Namun seberapa kenal kita dengan musik Sape Kalimantan, Saluang dan Talempong Minangkabau, Sasando Rote? Semua musik tersebut sama-sama musik etnik atau dikenal dengan sebutan *world music* karena berasal dari daerah-daerah atau kampung-kampung. Perbedaannya terletak pada pegiat musik tersebut. Musik jazz diadaptasi banyak orang dan dimainkan di seluruh dunia sehingga musik jazz dicitrakan sebagai musik Amerika dan Eropa. Sementara musik etnik nusantara masih kurang banyak pegiat maupun peminatnya. Sementara itu, perkembangan teknologi yang kian membuat dunia ibarat *'global village'* tanpa sekat, sedikit banyak mengakibatkan terjadinya imperialisme budaya yang ujungnya dapat berdampak pada kelestarian musik etnik tersebut.

Di tengah lirihnya gaung musik nusantara, seorang musisi etnik Sape Kalimantan asal Bandung yang telah menelurkan 13 album, Rayhan Sudrajat, membulatkan tekad untuk menjaga eksistensi berkumandangnya musik nusantara melalui ilmu etnomusikologi yang sedang ditimbanya di Monash University, Australia dengan pendanaan beasiswa LPDP.

Dari Parahyangan ke Borneo

Ketertarikan Rayhan pada musik etnik dimulai sejak kelas 2 SMA. “Di pertengahan SMA saya tertarik dengan alat musik kecapi dari Sunda, lalu saya belajar privat”, ungkap pecinta *The Beatles* sejak usia SD ini. Kepiawaian Rayhan memetik dawai-dawai membawanya melanglang buana sejak usia pertengahan SMA. Kecapi Sunda membawanya ke Eropa dan di 2017 Sape Kalimantan membawanya sebagai perwakilan Indonesia di program pertukaran musisi, OneBeat di Amerika.

Ke manapun berlabuh, musik etnik selalu membawa Rayhan kembali kepada panggilan jiwanya. Suatu kali di penghujung 2014, setelah *resign* dari pekerjaannya sebagai konsultan perusahaan aviasi, Rayhan berkesempatan mengunjungi kawan lamanya di Palangka Raya, Kalimantan. Di sana, ia diajak oleh temannya mengunjungi tempat-tempat masyarakat adat dan bermain alat-alat musik dari suku Dayak Ngaju. “Dari situlah saya mulai jatuh cinta dengan budaya Kalimantan Tengah, terutama suku Dayak Ngaju,” kenang pria berdarah Sunda-Lampung yang menguasai tiga bahasa Kalimantan ini.

Pengalaman awal memainkan musik etnik Dayak Ngaju membuat Rayhan terpanggil untuk terus menggali musik dari pulau Borneo tersebut. “Kalau dihitung sudah 7 atau 8 kali saya ke sana sejak 2014,” ujar sosok yang meyakini

bahwa perjalanannya ini adalah bagian dari ikhtiar yang sudah digariskan oleh Yang Kuasa. Bahkan riset Rayhan pada program master ini juga mengenai alat musik gong pada upacara kematian suku Dayak Ngaju/Katingan (tiwah) di Kalimantan Tengah.

Musik, Alam, dan Manusia

Perubahan era sangat memungkinkan manusia lambat laun tercerabut dari akarnya entah disadari atau tidak. Namun alam bersuara dan manusia-manusia yang dekat dengannya mampu mendengar itu dan memahaminya. Musik etnik yang terstigma sebagai “kuno” sejatinya adalah media untuk berhubungan dengan alam. Selama penelitian sekitar lima tahun terakhir di Kalimantan ditambah pengalamannya mengeksplor masyarakat suku Kanekes (Baduy), Rayhan tersentuh dengan filosofis dibalik musik-musik yang dimainkan oleh masyarakat adat. “Masyarakat adat ini bermain musik bukan hanya untuk *entertain* tapi untuk menghormati alam. Ada nilai spiritual dan keluhuran di balik musik yang mereka mainkan” terang Rayhan. Semakin dalam menyelami musik etnik semakin besar keinginan Rayhan untuk mempelajari lebih lanjut.

Etnomusikologi, papar Rayhan, adalah turunan dari antropologi, mempelajari manusia tapi melalui musik yang dimainkan. “Jadi kita bisa mengerti manusia lewat musiknya,” imbuh Rayhan.



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

sosial berguna sekali untuk membangun kolaborasi antarmusisi,” imbuhnya. Untuk mengakrabkan musik etnik di telinga milenial, Rayhan menambahkan, dapat dilakukan dengan mengcover lagu-lagu modern menggunakan alat musik etnik.

Mendengar petikan denting dawai Sape yang dimainkan Rayhan selalu berhasil membuat hati tersentuh. Bagi Rayhan, membuat karya yang berdampak adalah hal krusial. “Karena saat manusia telah tiada, satu-satunya yang ditinggalkan oleh mereka adalah karyanya. Sehingga di masa depan karya mereka masih bisa diakses oleh orang,” katanya. Kolaborasi juga penting dilakukan. Rayhan mencontohkan, kolaborasi yang terjalin dalam *Rahina Semesta*, karya teranyarnya bersama berbagai musisi etnik dalam dan luar negeri, dimana pesan lagu ini adalah kolaborasi musik serta saling mendukung dalam menghadapi pandemi corona. “Lagu ini bagi saya ciptaan semesta, yang hanya meminjam fisik saya sehingga menjadi sebuah karya,” ucapnya.

Sosok yang hangat dan terbuka ini tidak pernah lelah berkreatifitas memperkenalkan musik nusantara di mana saja. Untuk mengisi kegiatan sehari-hari selain berkuliah Rayhan juga bergabung dengan berbagai komunitas budaya dan musik etnik di kampusnya. “Setiap kali manggung di suatu acara saya juga cerita dulu mengenai alat musik ini apa dan filosofinya bagaimana,” ungkapnya. Rayhan berharap ke depan ia bisa mendalami tidak hanya musik Kalimantan dan Baduy tapi juga musik daerah lainnya yang belum dibahas oleh peneliti lain dan membagikan ilmunya sehingga ekosistem musik etnik nusantara bisa bertumbuh kuat.

Kelangkaan etnomusikolog di Indonesia, membuat Rayhan tergerak untuk mengambil jurusan yang langka peminat tetapi memiliki standar masuk yang tinggi ini. “Pertama karena *passion* saya memang di masyarakat adat dan musik etnik, kedua karena memang orang yang serius menekuni etnomusikologi belum terlalu banyak,” ujarnya.

Yakin dan suka

Tak jarang ada teman yang menyangsikan keputusan Rayhan mendalami etnomusikologi karena dianggap kurang “menjual” tapi Rayhan tidak menghiraukannya. “Yang terpenting bagi saya adalah saya yakin dan saya suka, jadi maju terus,” pungkasnya. Kegigihan Rayhan menjalani lika-liku untuk memperoleh beasiswa LPDP dan mendapat LoA dari Monash University berujung manis di 2017. Program Master by Research of Ethnomusicology di Monash University menjadi pilihan Rayhan dalam melanjutkan studi karena ada satu ahli musik Indonesia sejak tahun ’70, Prof. Margaret Kartomi, yang sudah 50 tahun terakhir berkarier di Monash. “Beliau ahli musik Sumatera, khususnya dari Aceh sampai Lampung. Sudah memahami

semua, musik di Jawa, dan di berbagai daerah lainnya juga, dan sekarang beliau menjadi pembimbing saya,” ucap Rayhan.

Rayhan sangat bersyukur karena LPDP membuka jalan bagi peminat program langka seperti etnomusikologi ini. “Saya bersyukur karena LPDP dapat melihat bahwa etnomusikologi ini penting untuk menjaga keberlangsungan budaya etnik sebagai jati diri bangsa,” terangnya. Pengalaman Rayhan memotivasi teman-teman musisi etnik lainnya untuk mengikuti jejak Rayhan melanjutkan studi. “Saya pikir inilah satu-satunya lembaga beasiswa di Indonesia yang benar-benar memberikan semua solusi untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut,” ucapnya.

Memajukan Musik Etnik

Menurut Rayhan, salah satu cara memajukan musik etnik di Indonesia adalah melalui eksplorasi musik etnik itu sendiri, baik dari segi akademis maupun dari segi musiknya. “Jadi tidak sebatas bermusik tetapi juga mengerti mengenai ilmunya, filosofi dibalik musik-musik yang dimainkan,” paparnya. Adaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada juga sangat penting. “Berbagai platform media

MENEPI SEJENAK KE DIENG CULTURE FESTIVAL

Teks dan Foto Herlambang Suko Prayogi,
pegawai DJBC Tanjung Priok

Penat, padat, dan panas seolah menjadi makanan sehari-hari selama di Jakarta. Rentan membuat seseorang mengalami kejenuhan. Itulah yang saya alami, sehingga terpikirkan untuk mengambil jatah cuti. Sejenak kabur untuk meregangkan otak, otot, dan pikiran yang selama ini kerap bersitegang. Setelah pencarian sana-sini, akhirnya pada awal agustus 2019 lalu, saya memutuskan untuk menepi sejenak ke Dataran Tinggi Dieng. Kebetulan di sana akan diselenggarakan Dieng Culture Festival (DCF), sebuah konser jazz yang menggabungkan musik dengan budaya dan kearifan lokal. Sudah sejak lama saya mendambakan bisa bergoyang menikmati alunan musik jazz sambil didekap udara dingin. Akhirnya, keinginan tersebut terwujud kali ini.

Hangatnya alunan jazz pegunungan

Daerah yang sering dikira wilayah Kabupaten Wonosobo, karena kedekatan geografisnya, secara administratif ternyata masuk Kabupaten Banjarnegara. Pilihan saya ke Dieng bukanlah keputusan yang salah. Dibandingkan destinasi wisata lain, biaya akomodasi di sana masih cukup bersahabat. Cukup merogoh kocek kurang lebih Rp1,2 juta untuk berlibur selama dua hari semalam. Biaya tersebut sudah mencakup dua tiket masuk festival, penginapan, transport, makan, souvenir festival dan wisata sekitaran Dieng.

Penyelenggaraan DCF ini sendiri sudah memasuki satu dekade sejak pertama kali digelar. Pihak penyelenggara tak pernah kehilangan akal untuk memikat penonton. Tiap tahun mereka mengundang bintang tamu kejutan mulai dari musisi jazz ternama hingga band-band label indie (independen).

Pengalaman yang tak bakal saya lupakan selama hadir di sini adalah, pertunjukan musik ini ditutup dengan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa diiringi dengan penyalan lampu. Langit Dieng menjadi saksi, betapa anak muda masih menyimpan nasionalismenya. Bulu kuduk merinding. Perasaan haru tak terelakkan membekap diri ini. Temaram malam terasa semakin memikat pada hari itu.

Pemotongan rambut gimbal

Kegiatan di hari kedua itu sayaawali dengan bangun pagi. Sedikit waktu istirahat rela saya luangkan demi melihat kemolekan matahari terbit di Bukit Scooter. Semburat indah sang mentari menyapa hangat semua orang yang akan berpesta hari itu. Hari itu merupakan puncak acara DCF berupa upacara pemotongan rambut gimbal di pelataran Candi Arjuna yang menjadi magnet utama yang berhasil mengundang ratusan penonton.

Wisatawan disambut dengan

pemberian selendang batik dan caping. Suara gamelan dan lengking merdu dari para sinden yang menyanyikan tembang-tembang Jawa menjadi pembuka rangkaian puncak. Rangkaian acara DCF mampu menyedot minat wisatawan untuk merasakan hangatnya adat budaya masyarakat Dieng. Festival ini juga mampu menggerakkan roda perekonomian di dua kabupaten, Wonosobo dan Banjarnegara, seperti yang disampaikan oleh para pejabat setempat saat memberi sambutan pembukaan acara tersebut.

Tak berselang lama, suara penonton bergemuruh. Bocah-bocah lokal berambut gimbal telah siap memulai upacara di pelataran candi. Terlihat pula para orangtua membawa barang-barang permintaan para bocah, yang merupakan syarat mutlak agar prosesi berjalan lancar. Dalam kepercayaan setempat, mereka wajib menuruti setiap permintaan yang diajukan para anak gimbal. Konon jika tidak dipenuhi, upacara pemotongan rambut gimbal ini akan sia-sia. Karena setelahnya, rambut sang anak akan tetap tumbuh gimbal.

Pemotongan rambut gimbal pun selesai dilaksanakan setelah diawali dengan ritual pembacaan doa kepada Tuhan oleh pemangku adat. Untuk menutup prosesi, pembawa acara membacakan biodata bocah gimbalnya, mulai dari nama, umur, nama orangtua, tempat tinggal, dan keinginan para bocah. Potongan rambut gimbal para peserta dilarung ke sungai. Warga Dieng percaya dengan hanyutnya rambut tersebut, terselip harapan luhur bahwa segala kemalangan dan kesialan tak akan menimpa anak-anak tersebut. Terakhir, pelepasan burung merpati menjadi tanda bahwa seluruh rangkaian DCF telah berakhir.

Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email mediakeuangan@kemenkeu.go.id sertakan nama, alamat, dan no telepon.

Makin Banyak Asuransi, Makin Baik?

Delapan puluh lima persen dari klien Jouska mengalami permasalahan salah beli asuransi. Jouska tidak menyalahkan siapa-siapa, namun terkadang pembeli asuransi sedikit kurang teliti dan detil. Pada dasarnya, asuransi kesehatan perlu dibeli karena sejatinya ada beberapa risiko yang tidak bisa kita hindari, namun dapat kita antisipasi.

Pernahkan Anda mendengar asuransi *unitlink*? Asuransi model ini adalah sebuah produk asuransi jiwa yang disajikan secara modern dimana setiap pemegang polis mendapatkan manfaat ganda dalam waktu bersamaan, yaitu mendapat perlindungan asuransi jiwa dan juga melakukan investasi. Bagaimana bisa? Jadi, premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi sebagian akan digunakan untuk membayar proteksi dan sebagian digunakan untuk reksadana. Biasanya, perusahaan asuransi memberi kita kebebasan untuk menentukan dimana kita ingin berinvestasi, misalnya, reksadana saham, reksadana campuran, atau reksadana pendapatan tetap. Kedengarannya sangat mudah dan menarik 'kan? Namun dalam aplikasinya *unitlink* ini cukup rumit dan perlu

pemahaman khusus untuk menghindari kerugian atau bahkan kehilangan. Jika Anda memilih *unitlink* hanya untuk keperluan investasi rasanya pilihan ini kurang efektif. Dan yang perlu Anda perhatikan sebelum memilih *unitlink*, kita perlu benar-benar memperhatikan *terms and condition* yang harus diikuti.

Namun demikian, sebaiknya setiap orang wajib memiliki asuransi kesehatan sejak lahir. Berikut ini daftar asuransi kesehatan berdasarkan urutan harga mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta per bulan yaitu BPJS, asuransi kesehatan

Operan, asuransi kesehatan *brand* internasional (nilai premi askes ini bisa mencapai 3x askes perusahaan internasional bertaraf standar, askes ini memfasilitasi *free general check up* setiap tahun).

Semakin banyak asuransi belum tentu lebih baik. Akan jauh lebih bijaksana jika Anda menyesuaikan asuransi dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Jangan lupa kenali perusahaan asuransi yang Anda pilih, pahami syarat yang ditentukan, serta baca dan pahami isi polis dengan benar sebelum Anda memutuskan membelinya.



Keep calm and choose the right insurance.

Foto Resha Aditya P

perusahaan lokal (*stand alone*), asuransi kesehatan perusahaan internasional bertaraf standar (*stand alone*), *unitlink* (dengan memperhatikan *terms and condition*), *unitlink* premium dengan biaya akuisisi

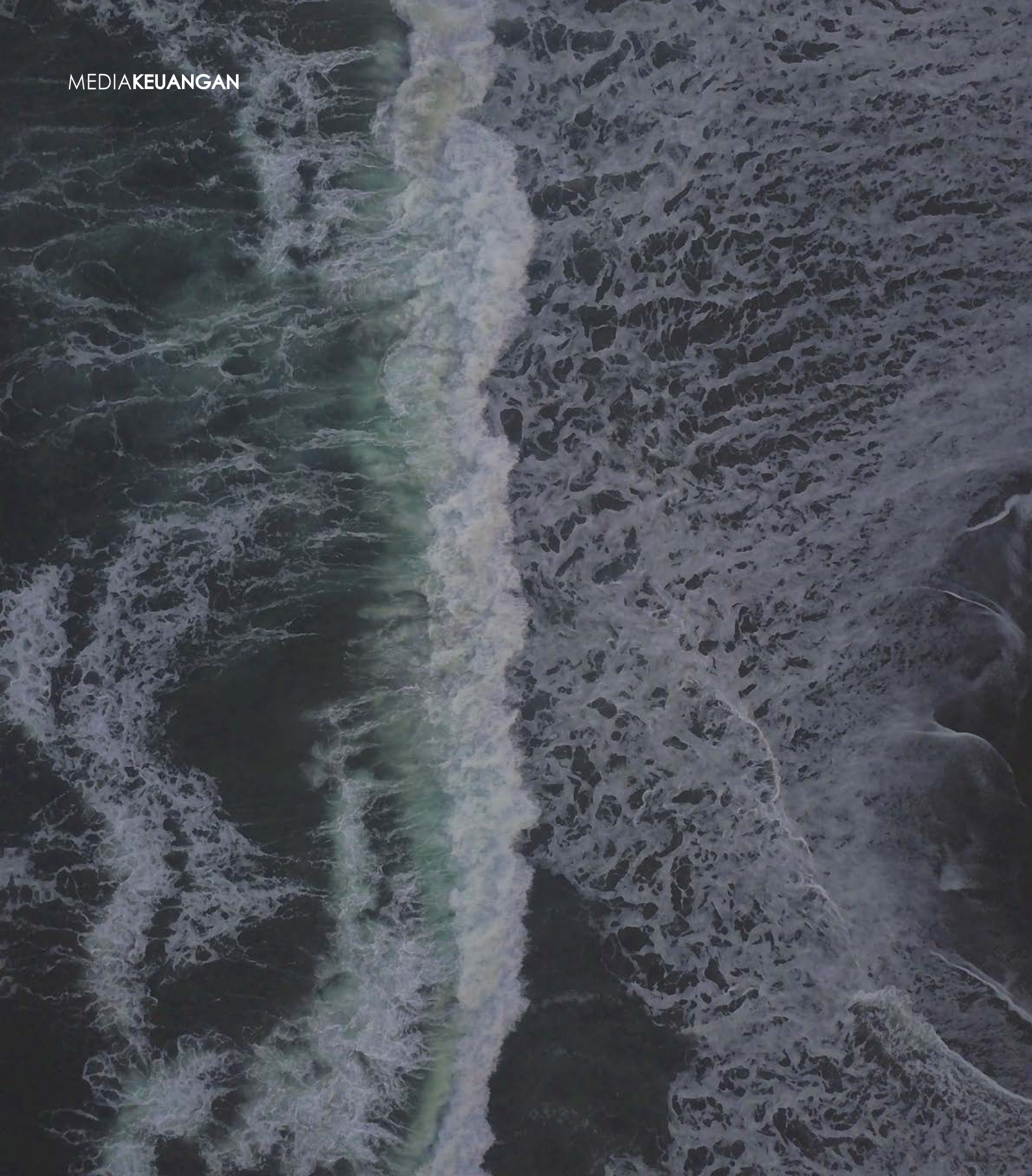
Mas Praim

"Gak Mudik Dulu"

Cerita : Yani Kurnia A. Gambar : Ditto Novenska



MEDIAKEUANGAN



HARI LAUT SEDUNIA
8 JUNI 2020

Foto
Faiz